

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank syariah di Indonesia muncul sejak tahun 1992, kehadiran perbankan syariah di Indonesia membawa industri perbankan Indonesia menjalankan konsep dual-banking sistem atau sistem perbankan ganda dalam industri perbankan nasional Indonesia. Perbankan syariah merupakan suatu alternatif dalam dunia perbankan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga masyarakat tidak terpaksa untuk bertransaksi dengan dan lembaga konvensional saja.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998, menyebabkan perbankan konvensional yang berbasis bunga mengalami keterpurukan. Sangat banyak bank konvensional yang harus dilikuidasi karena tidak mampu bertahan dengan situasi krisis ekonomi tersebut. Namun, perbankan syariah tetap kokoh berdiri dan tetap bisa menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik. Pada periode restrukturisasi perbankan, banyak perbankan konvensional mendapatkan bantuan dari pemerintah, sementara perbankan syariah tidak memerlukan bantuan pemerintah (Noor, 2006).

Sejak disahkannya UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, hal ini memberikan peluang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia karena telah ada landasan hukum yang jelas akan keberadaan perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel

dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia. Kita dapat melihat bagaimana perkembangan perbankan syariah di Indonesia pada table 1.1.

Tabel 1.1
Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2002 – 2011

BANK	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Jumlah Bank										
BUS	2	2	3	3	3	3	5	6	11	11
UUS	6	8	15	19	20	26	27	25	23	23
Jumlah Kantor Bank										
BUS+U US	127	253	355	504	531	597	820	998	1477	1737
BPRS	83	84	88	92	105	114	131	225	286	364
TOTAL	210	337	443	596	636	711	951	1223	1763	2101

Sumber : Bank Indonesia, 2011

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa industri perbankan syariah tumbuh sangat lambat. Sejak pendirian bank syariah pertama pada tahun 1992, penambahan satu bank syariah yang independen baru terjadi pada akhir tahun 1999. Kemudian, industri ini butuh 5 tahun untuk menambah satu bank syariah lagi menjadi 3 Bank Umum Syariah (BUS), yaitu pada tahun 2004. Jumlah ini tetap hingga periode tahun 2007. Pada akhir tahun 2008, jumlah BUS menjadi 5, dan ada penambahan satu BUS pada tahun 2009 sehingga berjumlah 6 unit BUS. Data terbaru pada tahun 2010 menunjukkan peningkatan jumlah BUS menjadi 11 unit. Maka, dapat kita lihat bahwa pada periode tahun 2009 hingga tahun 2010 terjadi peningkatan jumlah BUS yang cukup tinggi, jumlah ini tetap hingga tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa bank umum syariah telah mendapatkan kepercayaan yang besar dari masyarakat Indonesia sehingga perbankan syariah tumbuh dengan pesat (Bank Indonesia, 2011).

Data-data di atas merupakan suatu indikator bahwa bank syariah memiliki peran yang cukup besar dalam memajukan dunia perbankan di Indonesia, termasuk di Padang yang jumlah penduduknya cukup besar dibanding kota-kota lain di Sumatera Barat. Mengingat Sumatera Barat mayoritas masyarakatnya muslim, maka perbankan syariah di masa mendatang memiliki prospek cerah seiring dengan meningkatnya pengetahuan tentang kesadaran menggunakan produk perbankan, dan informasi serta pengalaman masyarakat tentang manfaat bank syariah.

Bank syariah dalam pengopersiannya menawarkan berbagai jenis produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, produk-produk bank syariah terdiri dari al-wadiah, pembiayaan dengan bagi hasil, jual beli, al-wakalah, al-kafalah, al-hawalah, dan ar-rhan. Dari semua produk yang paling banyak digunakan adalah pembiayaan dengan bagi hasil dan jual beli. Salah satu produk pembiayaan dengan bagi hasil berdasarkan penggunaannya yang diberikan bank syariah adalah pembiayaan konsumsi yang digunakan nasabah untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, dengan menggunakan skema Al-bai'bi atau jual beli dengan angsuran, Al-ijarah atau sewa beli, Al-musyarakah, dan Al-Rhan untuk memenuhi kebutuhan jasa. (Bapepam-Lk, 2010)

Pembiayaan konsumtif ini mendapat respon yang positif dari masyarakat, karena semakin bertambahnya populasi maka semakin besar permintaan akan barang konsumsi dan juga karena mayoritas masyarakat Sumatera Barat adalah muslim sehingga penggunaan pembiayaan konsumtif pada bank umum syariah terus meningkat, hal tersebut terbukti pada triwulan II-2010 pembiayaan konsumsi sebesar Rp. 645,32 miliar terjadi peningkatan yang cukup tinggi pada triwulan

berikutnya dimana pembiayaan konsumsi pada triwulan III-2010 mencapai Rp. 963,92 miliar dari total pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp. 1,74 triliun atau tumbuh sekitar 49,37%, hingga tahun 2011 total pembiayaan mencapai sebesar Rp. 2,4 triliun dengan penyaluran masih didominasi untuk pembiayaan konsumsi yaitu sebesar Rp. 1,53 triliun atau sekitar 58% dari total pembiayaan. Dengan ini mengindikasikan bahwa pada perbankan umum syariah di Sumatera Barat penyaluran pembiayaan masih banyak pada kegiatan konsumsi (Bank Indonesia, 2011). Peningkatan tersebut bisa dikarenakan sistem yang diterapkan oleh bank syariah sesuai dengan keinginan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan barang konsumsi atau faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap permintaan pembiayaan konsumtif.

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi disuatu daerah yaitu dengan melihat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi didalam suatu daerah dalam satu periode tertentu. Pertumbuhan perekonomian suatu daerah merupakan gambaran tentang komposisi perekonomian daerah dimana dalam hal ini komposisi perekonomian daerah terdiri atas sektor ekonomi/lapangan usaha. Sehingga struktur ekonomi sekaligus dapat menunjukkan tinggi rendahnya kontribusi atau peran seluruh sektor ekonomi terhadap pembentukan PDRB pada daerah tersebut (Sukirno, 2004).

Pada perbankan syariah dengan system bagi hasil atas penggunaan dana oleh pihak peminjam (baik oleh pihak nasabah maupun bank). Prinsip bagi hasil

(*profit sharing*) yang merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan (Antonio, 2001).

Suku bunga merupakan balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman). Suku bunga yang tinggi di satu sisi akan meningkatkan hasrat masyarakat untuk menabung sehingga jumlah dana perbankan akan meningkat. Sementara itu, di sisi lain suku bunga yang tinggi akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh dunia usaha sehingga mengakibatkan penurunan kegiatan produksi di dalam negeri. Menurunnya produksi pada gilirannya akan menurunkan pula kebutuhan dana oleh dunia usaha. Hal ini berakibat pada permintaan terhadap kredit perbankan juga akan menurun (Kasmir, 2001).

Permintaan pembiayaan yang dilakukan nasabah juga dipengaruhi kondisi makro suatu negara, salah satunya adalah resiko penurunan daya beli karena adanya inflasi. Inflasi adalah proses kenaikan harga unit barang secara terus menerus, sehingga tanpa kestabilan ekonomi, perekonomian akan bekerja secara efisien. Dalam kondisi tersebut terjadi inflasi yang deras, dimana ada kecenderungan inflasi yang tinggi akan menyebabkan permintaan kredit akan naik.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dan mencoba menganalisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya permintaan pembiayaan konsumtif pada bank syariah dengan judul **“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Konsumtif Bank Syariah di Sumatera Barat”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan pembiayaan konsumtif pada bank syariah di Sumatera Barat?
2. Apakah inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan pembiayaan konsumtif pada bank syariah di Sumatera Barat?
3. Apakah bagi hasil berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan pembiayaan konsumtif pada bank syariah di Sumatera Barat?
4. Apakah suku bunga berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan pembiayaan konsumtif pada bank syariah di Sumatera Barat ?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan hal-hal diatas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap permintaan pembiayaan konsumtif pada bank syariah di Sumatera Barat.

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh inflasi terhadap permintaan pembiayaan konsumtif pada bank syariah di Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh bagi hasil terhadap permintaan pembiayaan konsumtif pada bank syariah di Sumatera Barat.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh suku bunga terhadap permintaan pembiayaan konsumtif pada bank syariah di Sumatera Barat.

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Dari segi akademis, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan mengenai Perbankan Syariah dan Permintaan Pembiayaan Konsumtif pada Perbankan Syariah di Sumatera Barat
2. Bagi praktisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan memberikan motivasi untuk lebih giat mempelajari tentang Perbankan Syariah.

1.5 Hipotesa Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan kesimpulan yang akan dicapai sesuai hipotesa di bawah ini, yaitu:

1. Diduga PDRB berpengaruh positif terhadap permintaan pembiayaan konsumtif pada bank syariah di Sumatera Barat
2. Diduga inflasi berpengaruh positif terhadap permintaan pembiayaan konsumtif pada bank syariah di Sumatera Barat
3. Diduga bagi hasil berpengaruh negatif terhadap permintaan pembiayaan konsumtif pada bank syariah di Sumatera Barat

4. Diduga suku bunga berpengaruh positif terhadap permintaan pembiayaan konsumtif pada bank syariah di Sumatera Barat.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini hanya memfokuskan mengenai PDRB, bagi hasil, suku bunga dan inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan konsumtif pada bank syariah di Sumatera Barat periode tahun 2007.I–2011.IV

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesa penelitian,

BAB II : LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN LITERATUR

Berisikan tinjauan pustaka yang terdiri dari teoritis dan tinjauan empiris.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Merupakan bab metodologi penelitian yang menjelaskan tentang data dan sumber data, dan metode penelitian.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Menjelaskan tentang gambaran umum tentang penelitian.

BAB V : ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan hasil penelitian dan penemuan.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Permintaan

Konsep permintaan merupakan hubungan antara jumlah barang yang diminta (Q_d) dengan harga (P) berbagai tingkat harga. Hukum permintaan (*law of demand*) menerangkan bahwa dalam keadaan hal lain tetap (*ceteris paribus*) apabila harga naik, maka permintaan terhadap suatu barang akan berkurang, dan sebaliknya apabila harga turun, maka permintaan terhadap suatu barang akan meningkat.

Secara matematis dapat dijelaskan bagaimana perubahan harga mempengaruhi terhadap jumlah barang yang diminta. Supaya dapat dianalisis dengan jelas tingkah laku konsumen yang dinyatakan dalam hukum permintaan. Artinya bagaimana reaksi konsumen dalam kesediaanya membeli barang yang bersangkutan, dengan asumsi *ceteris paribus* (faktor-faktor lainnya dianggap konstan) (Sukirno, 2003).

Berdasarkan teori tersebut, maka model fungsi permintaan adalah sebagai berikut:

$$Q_{d_x} = f(P_x)$$

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi jumlah permintaan terhadap suatu komoditi selain dari faktor harga komoditi itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Harga barang itu sendiri

Jika harga suatu barang semakin murah, *ceteris paribus* maka permintaan terhadap barang itu bertambah, begitu pula sebaliknya

apabila harga barang semakin mahal maka permintaan terhadap barang tersebut akan berkurang.

2. Harga barang lain yang terkait

Faktor ini sangat dipengaruhi oleh sifat dari hubungan suatu jenis barang terhadap barang lain, dalam hal ini dapat dikelompokkan jenis suatu komoditi secara garis besarnya menjadi tiga macam bentuk dalam hal hubungannya dengan komoditi lain yaitu:

- a. Barang Substitusi, merupakan jenis komoditi yang mampu untuk menggantikan fungsi dari komoditi lain dalam memenuhi suatu kebutuhan tertentu manusia berdasarkan kesamaan manfaat yang akan diperoleh dari komoditi tersebut.
- b. Baarang Komplementer, merupakan jenis komoditi yang penggunaannya harus dilakukan secara bersama agar dapat dirasakan dan diambil manfaatnya oleh konsumen.

Apabila barang substitusi naik, maka permintaan terhadap barang itu sendiri akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga barang substitusi turun, maka permintaan terhadap barang itu sendiri akan turun.

3. Pendapatan konsumen

Pendapatan merupakan faktor utama yang menentukan efektifnya suatu permintaan terhadap barang atau jasa karena faktor ini merupakan nilai daya beli yang dimiliki oleh seorang konsumen, jika pendapatannya mengalami peningkatan berarti daya beli yang dimiliki juga meningkat atau ia memiliki kemampuan untuk menambah barang dan jasa yang akan dikonsumsinya.

4. Selera

Selera, kebiasaan, mode atau musim juga akan memengaruhi permintaan suatu barang. Jika selera masyarakat terhadap suatu barang meningkat, permintaan terhadap barang itu pun akan meningkat.

5. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk juga berpengaruh terhadap jumlah permintaan suatu jenis komoditi karena penduduk merupakan pangsa pasar potensial untuk memasarkan berbagai jenis komoditi yang akan dihasilkan dalam kegiatan ekonomi. Penambahan jumlah penduduk akan meningkatkan jumlah permintaan absolute terhadap suatu barang.

6. Kemakmuran

Kemakmuran identik dengan tingginya tingkat pendapatan masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor lain seperti: pendidikan, tingkat kesehatan masyarakat, keamanan dan lain sebagainya. Kemakmuran juga merupakan tujuan dari suatu negara.

7. Ramalan masa yang akan datang

Apabila kita memperkirakan harga suatu barang di masa mendatang naik, kita lebih baik membeli barang tersebut sekarang guna menghemat belanja di masa mendatang, maka permintaan terhadap barang itu sekarang akan meningkat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hubungan antara permintaan dan perkiraan harga di masa mendatang adalah *positif*.

8. Usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan

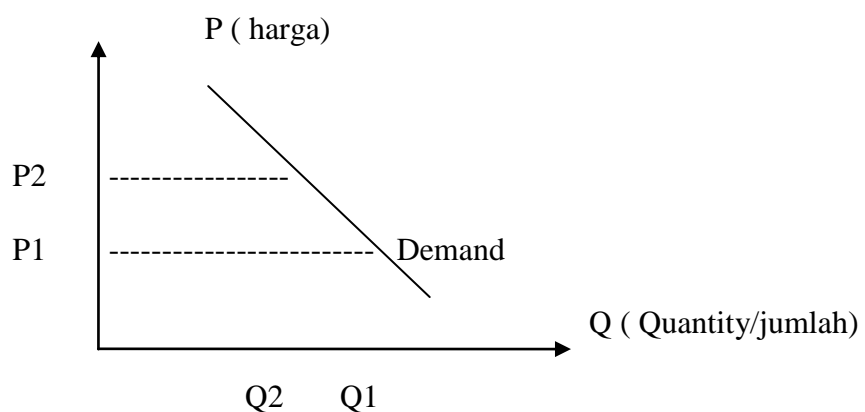
Dengan cara melakukan pengiklanan yang memungkinkan masyarakat untuk mengenal suatu barang baru atau menimbulkan permintaan terhadap barang tersebut.

2.1.2 Bentuk Kurva Permintaan

Kurva permintaan merupakan kurva yang menunjukkan jumlah maximum yang dibeli oleh konsumen dalam suatu unit waktu tertentu pada berbagai tingkat harga.

Secara umum kurva permintaan bergerak dari kiri atas kekanan bawah, atau dengan kata lain slopenya negatif.. Kurva yang mempunyai sifat demikian disebabkan oleh sifat keterkaitan antara tingkat harga dan jumlah yang diminta, yakni mempunyai sifat hubungan yang terbalik. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar: 2.1
Kurva Permintaan



Pada tingkat harga sebesar P_1 jumlah barang yang diminta sebesar Q_1 . Sedangkan pada tingkat harga sebesar P_2 jumlah barang yang diminta turun menjadi Q_2 .

2.1.3 Hukum Permintaan

Hukum permintaan menyatakan, “Jika harga suatu barang naik, maka jumlah yang diminta akan barang tersebut turun. Dan jika harga suatu barang turun, maka jumlah yang diminta barang tersebut naik”.

Pada dasarnya ada tiga alasan yang menerangkan hukum permintaan seperti diatas, yaitu :

1. Pengaruh penghasilan (*income effect*)

Apabila suatu harga barang naik, maka dengan uang yang sama orang akan mengurangi jumlah barang yang akan dibeli. Sebaliknya, jika harga barang turun, dengan anggaran yang sama orang bisa membeli lebih banyak barang.

2. Pengaruh substitusi (*substitution effect*)

Jika harga suatu barang naik, maka orang akan mencari barang lain yang harganya lebih murah tetapi fungsinya sama. Pencarian barang lain itu merupakan substitusi.

3. Penghargaan subjektif (*Marginal Utility*)

Tinggi rendahnya harga yang bersedia dibayar konsumen untuk barang tertentu mencerminkan kegunaan atau kepuasan dari barang tersebut. Makin banyak dari satu macam barang yang dimiliki, maka semakin rendah penghargaan terhadap barang tersebut. Ini dinamakan *Law of diminishing marginal utility*.

2.1.4 Elastisitas Permintaan

Elastisitas adalah derajat kepekaan kuantitas yang diminta (ditawarkan) terhadap salah satu faktor yang mempengaruhi fungsi permintaan (penawaran). Elastisitas harga (permintaan) adalah presentase perubahan kuantitas yang diminta yang di sebabkan oleh perubahan harga barang tersebut sebesar 1 (satu) persen. Elastisitas harga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Elastisitas Harga (Eh)} = \left| \frac{\% \text{ Perubahan Kuantitas yang diminta}}{\% \text{ Perubahan harga barang tersebut}} \right|$$

Atau:

$$Eh = - \frac{\frac{\Delta Q}{Q}}{\frac{\Delta P}{P}} = - \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$$

Elastisitas permintaan bisa elastis, unitary elastis, atau inelastis.

Interpretasi elastisitas harga di dalam permintaan yaitu:

- Jika $E_h > 1$, Elastis, % perubahan Q > % perubahan P
- Jika $E_h = 1$, Unitary elastis, % perubahan Q = % perubahan P
- Jika $E_h < 1$, Inelastis, % perubahan Q < % perubahan P

2.1.5 Elastisitas Permintaan Silang

Elastisitas permintaan silang mengukur bagaimana perubahan kuantitas yang diminta atas sebuah produk mempengaruhi harga produk lainnya. Elastisitas silang berhubungan dengan karakteristik kedua produk, yaitu :

1. Produk substitusi.

Elastisitas permintaan silang adalah positif, dimana kenaikan harga produk A akan menaikkan permintaan atas produk B. Contoh produk substitusi : minyak tanah dan kayu bakar, makanan ringan yang tersedia dalam berbagai merek, beras berkualitas sama merk A dan B, dan lain sebagainya.

2. Produk komplementer.

Elastisitas permintaan silang adalah negatif , dimana kenaikan harga produk A akan menurunkan permintaan produk B, vice versa. Contoh produk komplementer misalnya bensin dan mobil (mobil tidak dapat digunakan tanpa bensin). Jika harga bensin naik, permintaan akan mobil akan cenderung turun (Rahardja dan Manurung, 2004).

2.1.6 Teori Permintaan Uang dalam Ekonomi Islam (Suprayitno, 2005)

Dalam ekonomi Islam, hanya dikenal dua motif permintaan akan uang, yaitu motif transaksi dan motif berjaga-jaga sedangkan motif spekulasi menjadi nol dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, permintaan uang dalam ekonomi Islam berhubungan dengan tingkat pendapatan. Meningkatnya pendapatan akan meningkatkan permintaan atas uang oleh masyarakat. Secara matematik dirumuskan :

$$M_D = f\left(\frac{Y}{\mu}\right)$$

Di mana:

M_D = Permintaan uang dalam masyarakat islam

Y = Pendapatan

μ = Tingkat biaya karena menyimpan uang dalam bentuk kas

2.1.7 Permintaan Uang Mazhab Iqtishaduna

Permintaan uang ditujukan hanya untuk memenuhi dua tujuan pokok, yaitu untuk transaksi atau berjaga-jaga. Secara matematis diformulasikan dengan:

$$\mathbf{Md} = \mathbf{Md}_{trans} + \mathbf{Md}_{pre}$$

Dimana:

\mathbf{Md} = Permintaan uang dalam masyarakat Islam

\mathbf{Md}_{trans} = Kebutuhan akan transaksi (Transaction motif)

\mathbf{Md}_{pre} =Kebutuhan untuk berjaga-jaga (Precautionary motif)

Permintaan uang untuk transaksi merupakan fungsi tingkat pendapatan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendapatan, permintaan akan uang untuk memfasilitasi transaksi barang dan jasa juga meningkat.

Fungsi permintaan akan uang untuk motif berjaga-jaga (meliputi juga permintaan akan uang untuk investasi dan tabungan) ditentukan oleh besar kecilnya harga barang tangguh untuk pembelian barang tidak tunai.

Setiap fungsi permintaan akan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\mathbf{Md}_{trans} = \mathbf{f} (\mathbf{Y})$$

$$\mathbf{Md}_{pre} = \mathbf{f} (\mathbf{Y}, \mathbf{Pt/Po}) ,$$

P_t / P_o adalah rasio harga antara harga bayar tangguh (future price) dengan harga bayar kini (present price) .

Dalam formula permintaan uang di bawah terlihat bahwa variabel bebas pendapatan mempunyai koefisien yang positif dan harga bayar tangguh mempunyai koefisien negatif.

$$Md = f(Y, P_t / P_o)$$

2.1.8 Permintaan Uang Mazhab Mainstream

Strategi utama mazhab mainstream adalah pengenaan pajak terhadap aset produktif yang menganggur (dues of iddle cash) dengan tujuan mengalokasikan sumber dana pada kegiatan usaha produktif. Semakin tinggi pajak yang dikenakan terhadap aset produktif yang dianggurkan, permintaan terhadap aset ini akan berkurang. Kebijakan ini berdampak pada pola permintaan akan uang untuk motif berjaga-jaga.

Secara matematis, permintaan uang untuk mazhab kedua ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Md = Md_{trans} + Md_{pre}$$

$$Md_{trans} = f(Y)$$

$$Md_{pre \& trans} = f(Y, \mu)$$

Dimana:

Md = Permintaan uang dalam masyarakat islam

Y = Pendapatan

μ = Tingkat biaya karena menyimpan uang dalam bentuk kas

Tingkat dues of iddle fund diwakili oleh nilai μ , Semakin tinggi nilai μ , semakin kecil permintaan akan uang untuk motif berjaga-jaga karena biaya risiko untuk membayar pajak terhadap uang tunai tersebut menjadi naik, apabila nilai μ relatif rendah, tindakan memegang atau menyimpan uang tunai relatif tidak berisiko. Tinggi rendahnya tingkat risiko menyimpan uang tunai (Ω) dipengaruhi oleh besarnya dues of iddle fund (μ) dikurangi risiko investasi (Ψ)

$$\Omega = \mu - \Psi$$

Dalam persamaan di bawah ini kita dapat tuliskan bahwa variabel pendapatan (Y) berbanding positif dengan banyaknya permintaan uang dan berbanding terbalik dengan nilai pajak yang dikenakan terhadap aset atau kekayaan yang dianggurkan (μ).

$$Md = f \left(Y, \mu \right)$$

+ -

2.1.9 Permintaan Uang Mazhab Alternatif

Keberadaan uang pada hakikatnya adalah representasi volume transaksi yang ada dalam sektor riil. Permintaan uang dalam mazhab ini erat kaitannya dengan konsep endogenous uang dalam Islam. Teori ini menjembatani pertumbuhan uang di sektor moneter dan pertumbuhan nilai tambah uang di sektor riil.

Permintaan uang adalah representasi keseluruhan kebutuhan transaksi dalam sektor riil (M.A Choudhury dalam Muhammad, 2002). Semakin tinggi kapasitas dan volume sektor riil, semakin meningkat permintaan akan uang. Variabel yang mempengaruhi permintaan akan uang adalah variabel

sosio-ekonomi (X), kebijakan pemerintah dalam regulasi ekonomi (Y), dan informasi objektif masyarakat akan kondisi riil perekonomian.

Secara matematis M.A Choudhury, memformulasikan permintaan akan uang sebagai berikut:

$$Ms(\pi, y, p, S, R, X, Y)(\theta) = \sum_{b=1}^N Md_b(r_b, y, p, S, X, Y)(\theta)$$

$$Ms = \sum_{b=1}^N Md_b = \sum_{b=1}^N Ms = \sum_{j=1}^m \sum_{b=1}^N Md_{bj} = Md$$

$$b = 1, 2, 3, \dots, N$$

$$Md = f(r_b, y, p, S, X, Y)(\theta)$$

- Ket: Ms = Penawaran uang
 JI = Tingkat keuntungan yang diharapkan
 P = Tingkat harga atau inflasi
 S = Total pengeluaran nasional
 R = Reserve requirement
 X = Variabel sosio ekonomi
 Y = Kebijakan pemerintah dalam regulasi ekonomi
 Θ = Pengetahuan masyarakat akan kondisi objektif tiap-tiap variabel
 Md = Permintaan uang
 B = Lembaga keuangan
 rb = Rasio profit sharing
 y = Pendapatan riil

Formula diatas memperlihatkan hubungan antara variabel-variabel yang ada terhadap permintaan uang dan penawaran uang. Variabel bebas y , pendapatan riil yang dimiliki oleh seorang individu akan berhubungan secara positif dengan banyaknya permintaan akan uang. Variabel p , inflasi memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan banyaknya permintaan akan uang. Variabel pengeluaran nasional S , berhubungan secara positif dengan permintaan akan uang sedangkan X , dan Y adalah variabel untuk sosio-ekonomi dan kebijakan pemerintah. θ adalah induced-knowledge, pengetahuan masyarakat akan kondisi objektif tiap-tiap variabel, kualitas pengetahuan ini juga akan berpengaruh terhadap besaran permintaan akan uang yang diinginkan oleh seorang pelaku ekonomi.

2.1.10 Konsep Pembiayaan Konsumtif pada Perbankan Syariah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit (Antonio, 2001).

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 bagian antara lain :

1. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
2. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Perbedaan perlakuan antara pembiayaan konsumtif dan produktif terletak pada etode pendekatan analisisnya. Pada pembiayaan konsumtif, fokus analisa dilakukan pada kemampuan financial pribadi dalam mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya, seperti gaji. Sedangkan pada pembiayaan produktif, focus analisa diarahkan pada kemampuan financial usaha untuk melunasi pembiayaan yang telah diterimanya.

Secara garis besar seorang muslim akan mengalokasikan konsumsinya untuk dua jenis konsumsi, yaitu konsumsi untuk ibadah (C_i) dan konsumsi untuk duniawi (C_w). Dengan demikian konsumsi total (C_t) seorang muslim merupakan penjumlahan dari konsumsi untuk ibadah dengan konsumsi untuk duniawi, atau dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$C_t = C_i + C_w$$

Mankiw (2003) alokasi anggaran konsumsi seseorang akan mempengaruhi keputusannya dalam menabung dan investasi. Seseorang biasanya akan menabung sebagian dari pendapatannya dengan beragam motif, antara lain :

1. Untuk berjaga-jaga terhadap ketidakpastian yang akan datang
2. Untuk persiapan pembelian suatu barang konsumsi di masa depan
3. Untuk mengakumulasikan kekayaannya.

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Sedangkan

kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti makanan dan minuman, pakaian/ perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, dan sebagainya, maupun berupa jasa seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan, dan sebagainya.

Bank syariah dapat menyediakan pembiayaan konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema berikut ini,

1. *Al-bai'bi tsaman ajil* atau jual beli dengan angsuran
2. *Al-ijarah al-muntahia* atau sewa beli
3. *Al-musyarakah mustanaqhisah* atau *decreasing participation*, dimana secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya.
4. *Ar-Rahn* untuk memenuhi kebutuhan jasa.

Pembiayaan konsumsi tersebut diatas lazim digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder. Adapun kebutuhan primer pada umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pinjaman komersil. Seseorang yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya tergolong fakir atau miskin. Oleh karena itu, ia wajib diberi zakat atau sedekah, atau maksimal diberikan pinjaman kebajikan (*al-qardh al-hasan*), yaitu pinjaman dengan kewajiban pengembalian pinjaman pokoknya saja, tanpa imbalan apapun. (Antonio, 2001)

2.1.11 Jenis-Jenis Pembiayaan Perbankan Syariah

Menurut Siamat (2005) bentuk penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah dalam melaksanakan operasinya, bank syariah menawarkan beberapa produk perbankan sebagai berikut :

a. Pembiayaan Mudharabah

Bank menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja secara penuh (*trusty financing*), sedangkan nasabah menyediakan proyek atau usaha lengkap dengan manajemennya. Hasil keuntungan dan kerugian yang dialami nasabah dibagikan atau ditanggung bersama antara bank dan nasabah dengan ketentuan sesuai kesepakatan bersama.

b. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan sebagian dari modal usaha, yang mana pihak bank dapat dilibatkan dalam proses manajemennya. Modal yang disetor dapat berupa uang, barang perdagangan (*trading asset*), *property*, *equipment* atau *intangible asset* (seperti hak paten dan *goodwill*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

c. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan *murabahah* merupakan bentuk pembiayaan berprinsip jual beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan (*margin*) tertentu yang ditambahkan diatas biaya perolehan, di mana pelunasannya dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran.

d. Pembiayaan Al Bai'bitshaman Ajil

Pembiayaan untuk membeli barang dengan cicilan. Syarat-syarat dasar dari produk ini hampir sama dengan pembiayaan murabahah. Perbedaan diantara keduanya terletak pada cara pembayaran, dimana pada pembiayaan murabahah pembayaran ditunaikan setelah berlangsungnya akad kredit, sedangkan pada pembiayaan Al- Bai'bithaman ajil cicilan

baru dilakukan setelah nasabah penerima barang mampu memperlihatkan hasil usahanya.

e. Pembiayaan As-Salam

Pembiayaan ini diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan jangka pendek untuk produksi agrobisnis atau industri jenis lainnya.

f. Pembiayaan Istishna'

Pembiayaan ini diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan manufaktur, industri kecil-menengah dan konstruksi. Dalam pelaksanaannya pembiayaan istishna' dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pihak produsen ditentukan oleh bank atau pihak produsen ditentukan oleh nasabah. Pelaksanaan salah satu dari kedua cara tersebut harus ditentukan dimuka dalam akad berdasarkan kedua belah pihak.

g. Pembiayaan Ijarah (sewa beli)

Adalah akad sewa suatu barang antara bank dengan nasabah, dimana nasabah diberi kesempatan untuk membeli obyek sewa pada akhir akad atau dalam dunia usaha dikenal dengan finance lease.

Harga sewa dan harga beli ditetapkan bersama diawali perjanjian. Dalam pembiayaan ini yang menjadi obyek sewa diisyaratkan harus barang yang bermanfaat dan dibenarkan syariat dan nilai dari manfaat dapat diperhitungkan atau diukur.

Dalam perbankan syariah terdapat penyaluran jasa bank syariah Menurut Antonio (2003) penyaluran jasa bank syariah dibagi menjadi:

1) *Al-Wakalah*

Wakalah atau *wikalah* yang berarti penyerahan, pendelegasian atau

pemberian mandat. *Al-wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.

2) *Al-Kafalah*

Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

3) *Al-Hawalah*

Al-hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

4) *Ar-Rahn*

*Ar-rah*n adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

5) *Al-Qardh*

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.

2.1.12 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Pembiayaan Konsumtif

Permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Dalam penelitian ini hanya fokus pada empat faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu:

- a. Harga barang itu sendiri, jika harga suatu barang semakin murah, *ceteris paribus* maka permintaan terhadap barang itu bertambah, begitu pula sebaliknya. Pada dunia perbankan harga barang merupakan sejumlah cost yang dikeluarkan oleh nasabah untuk memperoleh sebuah jasa pembiayaan seperti bagi hasil.
- b. Harga barang lain yang terkait, harga barang lain juga dapat mempengaruhi permintaan suatu barang, dimana barang tersebut mempunyai keterkaitan yang bersifat substitusi (pengganti) dan bersifat komplementer (pelengkap). Pada dunia perbankan harga barang lain terkait sama dengan suku bunga, margin yang ditawarkan oleh bank lain sebagai pesaingnya.
- c. Tingkat pendapatan, Tingkat pendapatan suatu daerah akan menunjukkan daya beli konsumen. Semakin tinggi tingkat pendapatan daya beli konsumen semakin kuat, sehingga akhirnya akan mendorong permintaan terhadap suatu barang dan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, seperti perkembangan PDRB.
- d. Perkiraan harga dimasa yang akan datang, bila kita memperkirakan harga suatu barang akan naik, maka akan mendorong orang untuk membeli lebih banyak saat ini guna menghemat biaya belanja dimasa mendatang. Perkiraan dimasa mendatang juga dipengaruhi oleh kondisi makro seperti inflasi.

Dalam fungsi permintaan, maka kita dapat mengetahui hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas yang dapat ditulis sebagai berikut:

$$Qd_x = f(P_x)$$

$$Qd_x = f(P_1, P_2, P_3, P_4)$$

Keterangan:

Qd_x = Pembiayaan Konsumtif

P_1 = PDRB

P_2 = Inflasi

P_3 = Bagi Hasil

P_4 = Suku Bunga

Dari fungsi permintaan diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembiayaan konsumtif yaitu PDRB, Inflasi, Bagi Hasil, dan Suku Bunga.

2.1.13 Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijaksanaan pembangunan yang akan datang. Pembangunan suatu daerah dapat berhasil dengan baik apabila didukung oleh suatu perencanaan yang mantap sebagai dasar penentuan strategi, pengambilan keputusan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

Menurut pendapat Suparmoko (2002) mengemukakan bahwa PDRB adalah merupakan pendapatan atas faktor produksi yang dimiliki penduduk suatu wilayah atau daerah ditambah penduduk asing yang berada di wilayah / daerah tersebut.

PDRB meringkas aktivitas ekonomi dalam nilai uang tunggal dalam periode waktu tertentu, hal ini disebabkan karena mengukur pendapatan dan pengeluaran perekonomian pada outputnya dengan alasan bahwa jumlah keduanya adalah sama dan fakta yang mendasar, karena setiap transaksi memiliki penjual dan pembeli, setiap uang yang dikeluarkan seorang pembeli menjadi pendapatan seorang penjual yang lain. (Mankiw, 2003)

Produk domestik regional bruto dapat juga dihitung berdasarkan atas dua ukuran, yaitu atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Produk domestik regional bruto pada harga berlaku adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun dan dinilai menurut harga-harga yang berlaku pada tahun tersebut. Cara ini adalah cara yang selalu dilakukan dalam menghitung pendapatan dari suatu periode ke periode lainnya. Ada beberapa faktor yang telah dipandang oleh ahli-ahli ekonomi sebagai sumber penting yang dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi diantaranya, (1) tanah dan kekayaan alam lainnya, (2) jumlah, mutu dari penduduk dan tenaga kerja, (3) barang-barang modal dan tingkat teknologi, (4) sistem sosial dan masyarakat, (5) luas pasar sebagai sumber pertumbuhan (Sukirno, 2004).

2.1.14 Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi

Dalam Sukirno (2004) ada beberapa teori-teori yang menerangkan masalah pertumbuhan diantaranya:

a. Teori Pertumbuhan klasik

Menurut pandangan ahli-ahli klasik, ada empat factor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu, jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan.

Dalam teori ini dimisalkan luas tanah dan kekayaan alam adalah tetap jumlahnya dan tingkat teknologi tidak mengalami perubahan, berdasarkan teori yang dikemukakan dijelaskan perkaitan antara pendapatan perkapita dengan jumlah penduduk.

b. Teori Schumpeter

Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha didalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini ditunjukkan bahwa pengusaha merupakan golongan yang akan terus menerus membuat inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut merupakan: memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggikan efisiensi dalam memproduksi suatu barang, memperluas pasar ke pasar-pasar yang baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasiperusahaan dengan tujuan mempertinggi efisiensinya. Menurut Schumpeter investasi dibedakan menjadi dua golongan yaitu penanaman modal otonomi dan penanaman modal terpengaruh, makin tinggi tingkat kemajuan suatu ekonomi semakin terbatas kemungkinan untuk melakukan inovasi.

c. Teori Harrod-Domar

Dalam analisisnya menunjukkan bahwa pada suatu tahun tertentu (misalnya tahun 2002) barang-barang modal sudah mencapai kapasitas penuh, pengeluaran agregat tahun 2002 yaitu $AE = C + I$, akan menyebabkan kapasitas barang modal menjadi semakin tinggi pada tahun berikutnya (2003).

d. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Dalam teori ini melihat dari sisi penawaran yang dikembangkan Ambramovit dan Solow pertumbuhan ekonomi tergantung pada perkembangan factor-faktor produksi yang dinyatakan dalam persamaan:

$$\Delta Y = f(\Delta K, \Delta L, \Delta T)$$

Dimana: ΔY = Tingkat pertumbuhan ekonomi

ΔK = Tingkat pertambahan modal

ΔL = Tingkat penambahan penduduk

ΔT = Tingkat penambahan teknologi

Analisis Solow selanjutnya membentuk formula matematik untuk persamaan itu dan seterusnya membuat pembuktian secara matematik untuk menunjukkan kesimpulan bahwa factor terpenting yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukanlah penambahan modal dan tenaga kerja, tetapi adalah kemajuan teknologi dan skill tenaga kerja.

2.1.15 Konsep Inflasi

Inflasi yaitu, kenaikan dalam harga barang dan jasa, yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar. Dengan kata lain, terlalu banyak uang yang memburu barang yang sedikit. Inflasi menunjuk pada harga-harga lain (harga perdagangan besar, upah, harga, asset dan sebagainya). Secara umum akibat dari inflasi adalah menurunnya daya beli masyarakat karena secara riil tingkat pendapatannya juga menurun (Sukirno, 2003).

Faktor-faktor penyebab meningkatnya angka inflasi dapat dikategorikan dalam dua bagian, yaitu tarikan permintaan (kelebihan likuiditas/uang/alat tukar)

dan yang kedua adalah desakan(tekanan) produksi dan/atau distribusi (kurangnya produksi (*product or service*) dan/atau juga termasuk kurangnya distribusi). Untuk sebab pertama lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter (Bank Sentral), sedangkan untuk sebab kedua lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh Pemerintah (*Government*) seperti fiskal (perpajakan/pungutan/insentif/disinsentif), kebijakan pembangunan infrastruktur, regulasi, dll.

Berdasarkan jenisnya inflasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu :

1. Inflasi tarikan permintaan (*demand pull inflation*) terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan dimana biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar atau likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi tersebut.
2. Inflasi desakan biaya (*cost push inflation*) terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan/atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi, walau permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Adanya ketidak-lancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan-penawaran, atau juga karena terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru.

Berdasarkan keparahannya inflasi juga dapat dibedakan :

1. Inflasi ringan (kurang dari 10% / tahun)
2. Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% / tahun)
3. Inflasi berat (antara 30% sampai 100% / tahun)
4. Hiperinflasi (lebih dari 100% / tahun)

Inflasi IHK atau inflasi umum adalah inflasi seluruh barang/jasa yang dimonitor harganya secara periodik yang dapat menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi pada eceran barang dan jasa yang diminta oleh konsumen dari waktu ke waktu. Inflasi umum adalah komposit dari inflasi inti, inflasi *administered prices*, dan inflasi *volatile goods*.

Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (*hiperinflasi*), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu (Boediono, 2005).

2.1.16 Konsep Dasar Bagi Hasil

Bagi hasil atau *profit sharing* adalah prinsip pembagian laba yang diterapkan dalam kemitraan kerja, dimana porsi bagi hasil ditentukan pada saat aqad kerja sama. Jika usaha mendapatkan keuntungan, porsi bagi hasil disesuaikan dengan kontribusi modal masing-masing pihak. Dasar yang digunakan dalam bagi hasil adalah berupa laba bersih setelah dikurangi dengan biaya operasional. (Sudarsono, 2003)

Penegrtian lain menyatakan bahwa bagi hasil adalah suatu system yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dengan pengelola dana. Bentuk produk berdasarkan prinsip bagi hasil ini adalah *mudhrabah* dan *musyarakah*, lebih jauh prinsip mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar untuk produk pendanaan maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan. (Muhammad, 2002)

Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana pembagian hasil usaha. Bagi hasil dibedakan menjadi *profit sharing* dan *revenue sharing*.

1. *Profti Sharing*

Menurut Etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Didalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

2. *Revenue Sharing*

Berasal dari bahasa Inggris, yang terdiri dari dua kata yaitu *Revenue* yang artinya adalah hasil, pendapatan, penghasilan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue Sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. *Revenue* (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah

hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*).

Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah output yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut.

Syariah Islam dengan tegas meyakini bahwa bunga bank yang bersifat *pre-determined* akan mengeksploitasi perekonomian, cenderung terjadi misalokasi sumber daya dan penumpukan kekayaan dan kekuasaan pada segelintir orang. Hal ini akan membawa pada ketidakadilan, ketidakefisienan dan ketidakstabilan perekonomian.

Dalam ekonomi Islam sistem bagi hasil lah (*profit and loss sharing*) yang kemudian menjadi jantung dari sektor moneter Islam, bukan bunga. Karena sesungguhnya, bagi hasil sebenarnya sesuai dengan iklim usaha yang memiliki kefitrahan untung atau rugi. Tidak seperti karakteristik bunga yang memaksa agar hasil usaha selalu positif. Jadi penerapan sistem bagi hasil pada hakikatnya menjaga prinsip keadilan tetap berjalan dalam perekonomian. Karena memang kestabilan ekonomi bersumber dari prinsip keadilan yang dipraktikkan dalam perekonomian (Muhammad, 2002).

2.1.17 Tingkat Suku Bunga

Teori-teori tingkat bunga ada setelah berfungsinya uang dalam perekonomian. Secara efektif orang disatu pihak melihat uang sebagai salah satu dari sekian banyaknya aktiva keuangan, dilain pihak uang dianggap sebagai daya dorong dalam sektor keuangan atau sebagai aktiva yang seluruhnya dapat

menguasai semua alat keuangan lainnya. Menurut Teori Klasik bahwa tingkat bunga merupakan hasil interaksi antara tabungan dan investasi, sedangkan Teori Keynes mengatakan bahwa tingkat bunga merupakan suatu fenomena moneter, artinya tingkat bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan uang.

Suku bunga kredit adalah harga/biaya dari penggunaan dana yang tersedia untuk dipinjamkan. Suku bunga kredit berpengaruh negative terhadap permintaan kredit. Artinya semakin tinggi suku bunga kredit yang mencerminkan semakin mahalnya biaya maka akan menurunkan permintaan kredit, dan sebaliknya semakin rendah suku bunga kredit yang mencerminkan semakin murah biaya akan meningkatkan permintaan kredit. Dari uraian ini dapat disimak kembali teori-teori tingkat bunga ini.

a. Teori Klasik

Menurut teori Klasik tabungan merupakan fungsi dari tingkat suku bunga. Makin tinggi tingkat suku bunga, maka makin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menabung. Artinya pada tingkat suku bunga yang lebih tinggi masyarakat terdorong untuk mengorbankan atau mengurangi pengeluaran untuk konsumsi guna menambah tabungan. Investasi juga merupakan fungsi dari tingkat suku bunga. Makin tinggi tingkat suku bunga, maka keinginan untuk melakukan investasi juga makin kecil, sebab tingkat pengembalian dan penggunaan dana juga makin besar.

Bunga adalah harga dari penggunaan (*Leasable Funds*) atau harga yang terjadi di pasar dana investasi. Pengertian tingkat bunga sebagai harga, bisa juga dinyatakan sebagai harga yang harus dibayar apabila terjadi pertukaran antara satu rupiah sekarang dan satu rupiah nanti (misalnya setahun kemudian).

Hutang piutang timbul karena terjadi pertukaran pembeli dari satu rupiah sekarang sekaligus juga penjual dari satu rupiah nanti adalah peminjam (debitur), sedangkan penjual dari satu rupiah sekarang yang sekaligus juga pembeli satu rupiah nanti adalah orang yang meminjam (kreditur). Debitur harus membayar kepada kreditur harga dari pertukaran tersebut, dan harga ini adalah bunga yang dibayar debitur.

Tingkat bunga menentukan besarnya tabungan maupun investasi yang akan dilakukan di dalam perekonomian. Setiap perubahan dalam tingkat bunga akan menyebabkan perubahan dalam tabungan rumah tangga dan investasi. Perubahan dalam tingkat bunga akan terus menerus berlangsung sebelum kesamaan antara jumlah tabungan dengan jumlah investasi tercapai.

b. Teori Keynes

Teori tingkat bunga menurut Keynes ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Dalam analisis tradisional Keynes tentang permintaan uang, bahwa ada tiga motif mengapa orang menghendaki memegang uang tunai yaitu motif berjaga-jaga (*precaunary motive*), motif transaksi (*transaction motive*) dan motif spekulatif (*spekulative motive*). Dari ketiga motif tersebut, teori yang unik adalah motif spekulasi atau permintaan yang spekulatif akan uang. Dalam hal ini, Keynes berasumsi bahwa ada dua aktiva keuangan yakni : uang dan obligasi. Uang dianggap sebagai aktiva yang likuid, cair tetapi tidak mengandung suku bunga, sedangkan obligasi dianggap sebagai hutang-hutang jangka panjang yang tidak likuid, tidak cair dan mengandung suku bunga. Suku bunga ini berbanding terbalik dengan harga obligasi. Sehingga apabila suku

bunga di pasar turun, maka harga obligasi akan naik demikian pula sebaliknya (Boediono, 2005).

Adanya kenaikan tingkat suku bunga pada bank-bank umum akan mempengaruhi peran intermediasi dunia perbankan dalam perekonomian Indonesia. Bank-bank umum (konvensional) dalam operasionalnya sangat tergantung pada tingkat suku bunga yang berlaku, karena keuntungan bank konvensional berasal dari selisih antara pinjaman dengan bunga simpanan. Sedangkan dalam Bank Syariah tidak mengenal sistem bunga yang ada tetapi dengan menerapkan prinsip bagi hasil (*profit sharing*) antara bank dengan nasabah dalam pengelolaan dananya.

Walaupun demikian, dengan adanya kenaikan tingkat suku bunga pada bank-bank umum baik langsung maupun tidak langsung akan membawa dampak terhadap kinerja bank syariah. Dengan naiknya tingkat suku bunga maka akan diikuti oleh naiknya suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman pada bank konvensional. Sehingga orang akan cenderung untuk menyimpan dananya di bank konvensional daripada di bank syariah karena bunga simpanan di bank konvensional naik yang pada akhirnya tingkat pengembalian yang akan diperoleh oleh nasabah penyimpan dana akan mengalami peningkatan.

Kenaikan tingkat suku bunga inilah yang menjadi dilema dunia perbankan syariah saat ini, karena dikhawatirkan akan ada perpindahan dana dari bank syariah ke bank konvensional. Tetapi ada juga keuntungan yang diperoleh Bank Syariah dengan naiknya suku bunga yakni permohonan pembiayaan (kredit) di Bank Syariah oleh nasabah diperkirakan akan mengalami peningkatan seiring

dengan naiknya bunga pinjaman pada bank konvensional atau bank umum (Antonio, 2001).

2.2 Hubungan masing-masing variabel terhadap permintaan pembiayaan konsumtif pada bank syariah

a. PDRB dengan permintaan pembiayaan konsumtif

Bahwa PDRB berhubungan erat dengan permintaan disebabkan dengan adanya kenaikan PDRB maka tingkat konsumsi masyarakat akan semakin meningkat, oleh sebab itu jika PDRB meningkat maka permintaan akan kredit juga akan mengalami peningkatan guna mencukupi tingkat konsumsi yang dihadapi oleh masyarakat, sebagaimana dikutip dari penelitian yang dilakukan oleh Rifai (2007).

b. Inflasi dengan permintaan pembiayaan konsumtif

Inflasi sangat berpengaruh dengan permintaan kredit perbankan, dikarenakan inflasi berarti juga kenaikan harga. Semakin naiknya harga, maka seseorang akan berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan, dan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut bisa dengan cara mengajukan permintaan kredit / pembiayaan. Oleh karena itu maka dengan adanya kenaikan inflasi maka permintaan akan kredit juga akan semakin meningkat. Jadi inflasi memiliki hubungan yang positif terhadap permintaan kredit atau pembiayaan (Yusuf, 2009)

c. Bagi Hasil dengan permintaan pembiayaan konsumtif

Bagi hasil dinyatakan dalam bentuk persentase tertentu yang ditetapkan oleh bank syariah. Bagi hasil keuntungan merupakan tingkat keuntungan yang diperoleh bank syariah dari harga jual objek yang ditawarkan bank syariah kepada nasabahnya. Diduga bagi hasil akan berpengaruh secara signifikan negatif

terhadap permintaan pembiayaan, artinya semakin tinggi bagi hasil yang ditetapkan bank syariah maka akan menurunkan permintaan pembiayaan dan sebaliknya semakin rendah bagi hasil yang ditetapkan maka akan meningkatkan permintaan pembiayaan Hosen (2009).

d. Suku Bunga dengan permintaan pembiayaan konsumtif

Suku bunga kredit pinjaman merupakan harga yang ditetapkan oleh bank konvensional terhadap dana yang mereka miliki ketika dana tersebut disalurkan dalam bentuk kredit pada nasabah kredit. Suku bunga kredit biasanya mengacu pada suku bunga SBI yang ditetapkan oleh bank konvensional. Suku bunga dilembaga keuangan konvensional merupakan pertimbangan utama bagi nasabah dalam melakukan permintaan pembiayaan pada bank syariah. Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya bisa bersifat substitusi terhadap dana pinjaman yang disalurkan, sehingga nasabah peminjam menganggap tingkat bunga dilembaga keuangan lainnya lebih tinggi akan meningkatkan permintaan pembiayaan pada perbankan syariah (Jumhur, 2009).

2.3 Tinjauan Literatur

Arlina dan Ganjang (2008), "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Permintaan Kredit Pada PT Bank Tabungan Negara Cabang Medan". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor tingkat suku bunga, dan pelayanan nasabah dalam mempengaruhi keputusan permintaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Studi menunjukkan bahwa tingkat suku bunga dan pelayanan secara serempak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan permintaan KPR pada PT Bank Tabungan Negara Cabang Medan.

Yusuf (2009), “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Konsumtif Bank Pemerintah di Sumatera Utara”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh PDRB, suku bunga pinjaman, dan inflasi terhadap permintaan kredit konsumtif. Dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, dapat disimpulkan bahwa permintaan kredit konsumtif di pengaruhi signifikan secara positif oleh variabel PDRB dan inflasi, sedangkan variabel suku bunga pinjaman berpengaruh negatif secara signifikan terhadap permintaan kredit konsumtif bank pemerintah di Sumatera Utara.

Penelitian yang dilakukan Hosen (2009), “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Di Indonesia (Periode Januari – Desember 2008). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh margin murabahah, suku bunga kredit, inflasi, nilai tukar, akses dan nilai jaminan terhadap permintaan pembiayaan murabahah. Dengan menggunakan analisis regresi berganda, diketahui hasil penelitian bahwa permintaan pembiayaan murabahah dipengaruhi signifikan secara positif oleh variable akses sedangkan suku bunga, nilai tukar dan margin berpengaruh negatif, sementara variabel inflasi dan nilai jaminan dikeluarkan dari model karena tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap permintaan murabahah.

Jumhur (2009) dalam penelitiannya mengenai “Analisis Permintaan Kredit Modal Kerja Usaha Kecil di Kota Pontianak (Studi Kasus Permintaan Modal Kerja Usaha Kecil Sektor Perdagangan dari BMT” , meneliti tentang bagaimana pengaruh variabel total asset, tingkat keuntungan perbulan, rasio bagi hasil, dan tingkat bunga terhadap probabilita permintaan kredit modal kerja usaha kecil dari BMT di kota Pontianak. Dari keempat variabel independen yang diteliti, terdapat

variabel yang berpengaruh signifikan dan positif yaitu total asset, tingkat bunga, dan tingkat keuntungan perbulan yang diperoleh usaha kecil sektor perdagangan berpengaruh positif terhadap permintaan modal kerja usaha kecil di kota Pontianak, tapi tidak signifikan terhadap probabilita permintaan kredit modal kerja dari BMT, sedangkan rasio bagi hasil berpengaruh negatif karena rasio bagi hasil merupakan biaya penggunaan dana oleh nasabah peminjam yang harus dikembalikan.

Penelitian yang dilakukan Pratama (2010) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan” (Studi pada Bank Umum di Indonesia Periode Tahun 2005–2009). Dalam penelitian ini menggunakan variable-variabel independen Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Aquancy Ratio (CAR), Non Perfoming Loan (NPL), dan suku bunga sertifikasi Bank Indonesia (SBI), serta variable dependen kredit perbankan. Untuk mencapai tujuan penelitian ini dilakukan pengujian asumsi klasik dan menggunakan model regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa secara parsial pengaruh variabel DPK terhadap kredit berpengaruh positif signifikan, sedangkan variable CAR, NPL, suku bunga SBI, berpengaruh negatif signifikan terhadap kredit.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber data

Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari suatu lembaga tertentu. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk data time series selama periode 2007.I – 2011.IV Data ini diperoleh dari literatur dan laporan yang erat relevansinya terhadap penelitian.

3.2 Operasional Variabel

- a. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan konsumsi, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Periode pembiayaan konsumtif di perbankan syariah di Sumatera Barat tahun 2007.I - 2011.IV
- b. Inflasi adalah kenaikan dalam harga dan jasa yang secara terus menerus. Periode laju Inflasi di Sumatera Barat tahun 2007.I - 2011.IV
- c. PDRB adalah pendapatan atas faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk suatu wilayah/daerah ditambah penduduk asing yang berada di wilayah/daerah tersebut. Periode PDRB di Sumatera Barat tahun 2007.I - 2011.IV
- d. Bagi hasil (*profit sharing*) adalah suatu system yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana pembagian hasil usaha. Dalam penelitian ini data yang diambil adalah persentase bagi hasil

pembiayaan yang diberikan perbankan syariah. Periode bagi hasil pembiayaan yang digunakan yaitu tahun 2007.I - 2011.IV

- e. Suku bunga adalah harga/biaya dari penggunaan dana yang tersedia untuk dipinjamkan yang ditetapkan oleh bank konvensional. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah persentase suku bunga rata-rata kredit konsumtif pada bank konvensional. periode suku bunga yang digunakan yaitu tahun 2007.I - 2011.IV

3.3 Metode Analisa Data

Untuk mengetahui yang mempengaruhi permintaan pembiayaan konsumtif pada bank syariah penulis menggunakan persamaan regresi linear berganda (*multiple linear regression*) yaitu suatu model dimana variabel tak bebas tergantung pada dua atau lebih variabel yang bebas (Firdaus, 2004). Variable terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah permintaan pembiayaan konsumtif dan sebagai variable bebas (*independent variable*) adalah PDRB, inflasi, bagi hasil, dan suku bunga sehingga dapat di tulis sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Dimana:

Y = Permintaan pembiayaan konsumtif (Rupiah)

X₁ = Produk Domestik Regional Bruto (Rupiah)

X₂ = Inflasi (%)

X₃ = Profit sharing / Bagi Hasil (%)

X₄ = Suku Bunga (%)

$\beta_0 - \beta_4$ = Koefisien masing-masing variabel

ε = Standar Error

3.4 Pengujian Asumsi Klasik

3.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Penggunaan uji normalitas karena pada analisis statistik parametrik, asumsi yang harus dimiliki oleh data adalah bahwa data tersebut harus terdistribusi secara normal. Menurut Gujarati (2003) uji normalitas terdiri dari tiga prosedur pengujian yaitu:

a. Histogram residu

Histogram residu merupakan perangkat grafik sederhana yang digunakan untuk mempelajari sesuatu tentang bentuk fungsi kepadatan probabilitas dari suatu variabel acak. data dikatakan normal jika bentuk kurva memiliki kemiringan yang cenderungimbang baik sisi kiri maupun sisi kanan dan kurva berbentuk lonceng yang hampir sempurna.

b. Gambar Probabilitas Normal

Gambar probabilitas normal menggunakan kertas distribusi normal pada sumbu horizontal (sumbu X) menggambarkan nilai variabel yang diamati, dan pada sumbu vertikal (sumbu Y) menunjukkan nilai harapan dari variabel ini seandainya distribusinya normal. Oleh karena itu, jika variabel yang diamati sesungguhnya berasal dari populasi normal, maka gambar probabilitas normal akan mendekati garis lurus.

c. Uji Jarque-Bera

Uji ini mula-mula menghitung koefisien kemencengan (skewness) dan peruncingan (kurtosis). Untuk variabel yang didistribusikan secara normal jika nilai skewness dan kurtosis adalah nol.

3.4.2 Multikolinearitas

Menurut Firdaus (2004) istilah multikolinearitas mula-mula dikemukakan oleh Ragner Fisher yang mempunyai arti hubungan linier sempurna antar variabel, variabel independen dalam suatu model regresi.

Hal-hal utama yang sering menyebabkan terjadinya multikolinieritas pada model regresi, antara lain:

- a. Kesalahan teoritis dalam pembentukan model fungsi regresi yang dipergunakan.
- b. Terlampau kecilnya jumlah pengamatan yang akan dianalisis dengan model regresi. Telah diketahui bahwa kesalahan pertama didalam pekerjaan ekonometrika adalah, masalah kecilnya jumlah data yang dipergunakan.

Akibat yang ditimbulkan dari multikolinieritas sebagai berikut:

1. Walau koefisien regresi dari variabel X dapat ditentukan (determinate), tetapi standar errornya akan cenderung membesar nilainya sewaktu tingkat kolinearitas antara variabel bebas juga meningkat.
2. Oleh karena nilai standar error dari koefisien regresi besar maka interval keyakinan untuk parameter dari populasi juga cenderung melebar.
3. Dengan tingginya tingkat kolinearitas, probabilitas untuk menerima hipotesis, padahal hipotesis itu salah menjadi membesar nilainya.

4. Bila kolinearitas ganda tinggi, seseorang akan memperoleh nilai R^2 yang tinggi tetapi tidak ada atau sedikit sekali koefisien regresi yang signifikan secara statistik.

Cara mengetahui ada tidaknya kolineritas ganda dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Kolinearitas sering dapat diduga jika R^2 cukup tinggi (antara 0,7-1) dan jika koefisien korelasi sederhana juga tinggi, tetapi tak satupun atau sedikit sekali koefisien regresi parsial yang signifikan secara individu. Di pihak lain, uji F menolak H_0 yang mengatakan bahwa secara simultan seluruh koefisien regresi parsial nilainya nol.
- b. Meskipun koefisien korelasi sederhana nilainya tinggi sehingga timbul dugaan bahwa terjadi multikolinearitas, tetapi dalam hal ini belum tentu berlaku.
- c. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dalam suatu model regresi berganda, kita sarankan tidak hanya melihat koefisien korelasi sederhana, tetapi juga koefisien parsial.
- d. Oleh karena kolinearitas timbul disebabkan adanya satu atau lebih variabel bebas yang berkorelasi sempurna dengan varaiabel bebas lainnya, salah satu caranya ialah dengan membuat regresi setiap X_i terhadap sisa variabel lainnya dan menghitung R^2 yang cocok dan kita beri simbol R_i^2 .

3.4.3 Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan hubungan diantara anggota observasi dalam waktu (*time seires*) cara yang dapat untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi,

dapat dilakukan dengan melihat pada table DW (Durbin Watson). Pengambilan keputusan didasari pada:

- a. Tidak terjadi autokorelasi jika $dU < DW < (4-dU)$
- b. Terjadi autokorelasi positif jika $DW < dL$
- c. Terjadi autokorelasi negatif jika $DW > (4dU)$
- d. Tanpa keputusan jika $dL < DW < dU$ atau $(4-dU) < DW < (4-dL)$

Untuk melihat ada tidaknya autokorelasi, dapat juga digunakan ketentuan sebagai berikut.

DW	Kesimpulan
Kurang dari 1,10	Ada autokorelasi
1,10 dan 1,54	Tanpa kesimpulan
1,55 dan 2,46	Tidak ada autokorelasi
2,46 dan 2,90	Tanpa kesimpulan
Lebih dari 2,91	Ada autokorelasi

Sumber: Firdaus, 2004

3.4.4 Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah suatu kesalahan dimana masing-masing kesalahan pengganggu mempunyai varian yang berlainan, akibatnya penaksiran OLS tetap tidak bias tetapi tidak efisien, untuk menaksir ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji korelasi Rank Sperman adalah sebagai berikut:

- a. Buatlah model regresinya: $Y_i = B_1 + B_2X_{2i} + B_3X_{3i} + B_4X_4 + \epsilon_i$
- b. Carilah nilai-nilai variabel gangguan penduga e_i

- c. Rangkings nilai-nilai e_i itu serta nilai-nilai e_i serta nilai-nilai X_1 yang bersangkutan dalam urutan yang semakin kecil atau semakin besar.
- d. Hitunglah koefisien regresi penduga Rank Spearman r_s dengan rumus:

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

Dimana:

d_i menunjukkan perbedaan setiap pasang rank

n menunjukkan jumlah pasang rank

- e. Bila r_s mendekati ± 1 maka kemungkinan besar terdapat heteroskedastisitas heteroskedastisitas dalam model itu, sedangkan bila r_s mendekati 0 maka kemungkinan adanya heteroskedastisitas kecil.

Jika model regresinya menyangkut lebih dari dua variabel maka langkah-langkah itu dipergunakan bagi setiap pasangan nilai e_i dan variabel bebas yang ada. Jadi, jika ada empat variabel bebas (X_1, X_2, X_3, X_4) maka akan diperoleh empat koefisien korelasi (Firdaus, 2004).

3.5 Uji Hipotesis Statistik

Pengujian hipotesis statistik dalam penelitian ini meliputi pengujian hipotesis secara parsial (uji-t), pengujian hipotesis secara simultan (uji-F), dan koefisien determinasi.

3.5.1 Uji F (F-test)

Uji F menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Artinya apakah semua variabel penjelas secara bersamaan merupakan variabel-variabel yang signifikan atau tidak signifikan terhadap variabel dependennya (Gujarati, 2003).

Secara statistik formulasi uji F adalah:

$$F = \frac{R^2 / (k-1)}{(1-R^2) / (n-k)}$$

Dimana :

R^2 = Koefisien determinasi

k = Jumlah koefisien variable

n = Jumlah observasi

Dengan hipotesis:

- Jika F-hitung > F-Tabel maka H_0 di tolak, Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y.
- Jika F-hitung < F-Tabel maka H_0 diterima, Artinya terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara variabel X terhadap variable Y.

3.5.2 Uji t (t-test)

Uji t pada dasarnya adalah menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual mempengaruhi variabel terikat (Gujarati,2003).

Nilai t-hitung dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{\beta_i}{Se(\beta_i)}$$

Di mana :

β_i = Parameter yang ditaksir

Se = Standar error

Dengan membandingkan t-hitung dan t-tabel maka dapat dilihat signifikan atau tidaknya hasil koefisien regresi. Nilai t-hitung selanjutnya dibandingkan

dengan nilai t-tabel pada derajat kebebasan (df) dengan tingkat keyakinan tertentu dengan keputusan sebagai berikut:

$t\text{-hitung} > t\text{-tabel} \longrightarrow$ Ho ditolak dan menerima H1

$t\text{-hitung} < t\text{-tabel} \longrightarrow$ Ho diterima dan menolak H1

3.5.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen ($X_1, X_2, X_3 \dots X_n$) secara serentak terhadap variabel dependen (Y). Apabila R^2 sama dengan 0, maka tidak ada sedikitpun persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependen. Sebaliknya R^2 sama dengan 1, maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% (Firdaus, 2004).

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Perkembangan Bank Syariah di Sumatera Barat

Perkembangan sektor perbankan sangat ditentukan oleh pasang surut perekonomian suatu daerah. Jika perekonomian suatu daerah menunjukkan perkembangan yang sangat berarti, maka pada daerah tersebut dapat dilakukan penambahan bank-bank baru.

Tabel 4.1
Banyaknya Kantor Cabang Bank Syariah Menurut Kepemilikan di Sumatera Barat 2007-2011

No.	Nama Bank Syariah	Kantor Cabang					Kantor Cabang Pembantu				
		2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
1.	PT. Bank Syariah Mandiri	1	1	1	1	1	-	-	-	2	2
2.	PT. Bank Muamalat Indonesia	1	1	1	1	1	-	-	-	2	2
3.	PT. Bank BNI Syariah	1	1	1	1	1	-	-	-	1	1
4.	PT. Bank BRI Syariah	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
5.	PT. Bukopin unit usaha Syariah	-	-	-	1	1	-	1	1	2	2
6.	PT. Syariah Mega Indonesia	-	1	1	1	1	-	3	3	3	3
7.	PT. BPD unit usaha Syariah	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-
8.	PT. Bank Danamon Unit Syariah				1	1	-	-	-	-	-

Sumber : BPS Sumatera Barat, 2011

Perkembangan perbankan syariah di Sumatera Barat mengalami peningkatan, pada tahun 2007 jumlah bank syariah adalah sebanyak 4 buah

hingga tahun 2011 jumlah Bank Syariah menjadi 8 buah bank syariah dengan jumlah kantor cabang sebanyak 8 buah dan kantor cabang pembantu 10 buah kantor. Dengan demikian perkembangan perbankan syariah di Sumatera Barat tidak terlepas dari semakin meningkatnya minat masyarakat untuk menggunakan perbankan syariah.

4.2 Pembiayaan Konsumtif Bank Syariah di Sumatera Barat

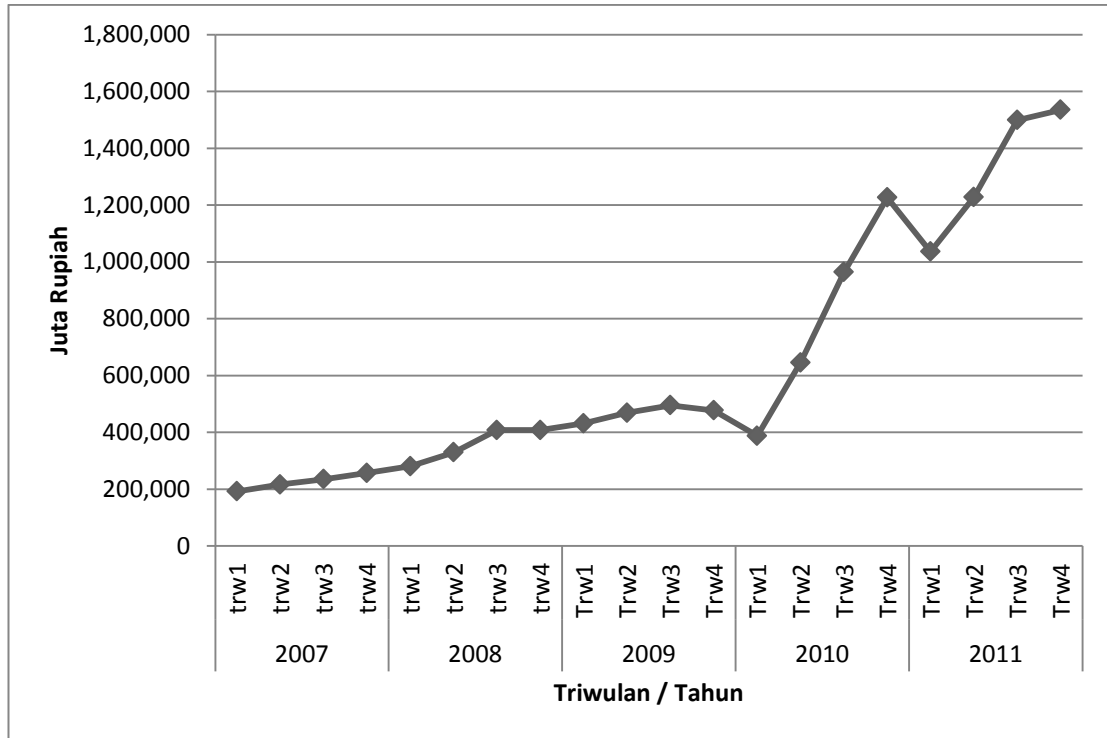
Secara umum pembiayaan konsumtif yang diberikan bank syariah di Sumatera Barat mengalami perkembangan yang cukup baik, dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Perkembangan Pembiayaan konsumtif Bank Syariah di Sumatera Barat
Triwulan Tahun 2007-2011

TAHUN	TRIWULAN	JUTA RUPIAH	PERTUMBUHAN (%)
2007	I	192.115	-
	II	216.425	12,65
	III	234.537	8,36
	IV	256.541	9,38
2008	I	280.494	9,33
	II	329.224	17,37
	III	407.763	23,85
	IV	407.546	-0,05
2009	I	431.669	5,91
	II	468.403	8,50
	III	494.951	5,66
	IV	477.209	-3,58
2010	I	387.468	-18,80
	II	645.326	66,54
	III	963.920	47,31
	IV	1.226.184	27,20
2011	I	1.035.580	-15,54
	II	1.228.184	18,59
	III	1.498.787	22,03
	IV	1.534.832	2,40

Sumber: Bank Indonesia, Tahun 2007 – 2011

Grafik 4.1
Perkembangan Pembiayaan Konsumtif Bank Syariah di Sumatera Barat
Triwulan I Tahun 2007 – Triwulan IV tahun 2011



Sumber: Bank Indonesia, Tahun 2007-2011

Perkembangan pembiayaan konsumtif bank syariah di Sumatera Barat cukup meningkat dari triwulan I.2007 sampai IV.2011. Hal ini disebabkan adanya permintaan masyarakat terhadap pembiayaan konsumtif yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan seperti pembelian rumah baru, renovasi rumah dan pembelian kendaraan bermotor. Permintaan pembiayaan konsumtif mengalami penurunan yang cukup besar yaitu pada triwulan I tahun 2010 dari Rp 477,20 miliar triwulan sebelumnya menjadi Rp 387,46 miliar atau minus 18,8 % disebabkan adanya peningkatan bagi hasil pembiayaan konsumsi yang diberikan bank syariah kepada nasabah sehingga menurunkan permintaan masyarakat terhadap pembiayaan konsumsi. Namun pada tahun yang sama pembiayaan

konsumsi oleh bank syariah mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada triwulan ke II yang pertumbuhannya mencapai 66,54%, dan pada triwulan III pembiayaan konsumsi yang mencapai Rp 963,92 miliar dari total pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp 1,74 triliun. Hal ini menandakan bahwa pada perbankan umum syariah di Sumbar penyaluran pembiayaan masih banyak berfokus pada kegiatan konsumsi. Pada triwulan IV-2011 penyaluran pembiayaan konsumsi sebesar Rp 1,53 triliun dari total pembiayaan yaitu sebesar Rp 2,4 triliun, pembiayaan yang disalurkan bank umum syariah tumbuh melambat. Secara umum pembiayaan bank umum syariah sangat didominasi oleh penyaluran untuk kegiatan konsumtif yang proporsinya mencapai 63,3%. Perlambatan dipicu oleh pertumbuhan pembiayaan konsumsi, kondisi ini diperkirakan adanya upaya bank umum syariah yang mulai menggarap penyaluran pembiayaan pada kegiatan produktif.

4.3 Perkembangan PDRB

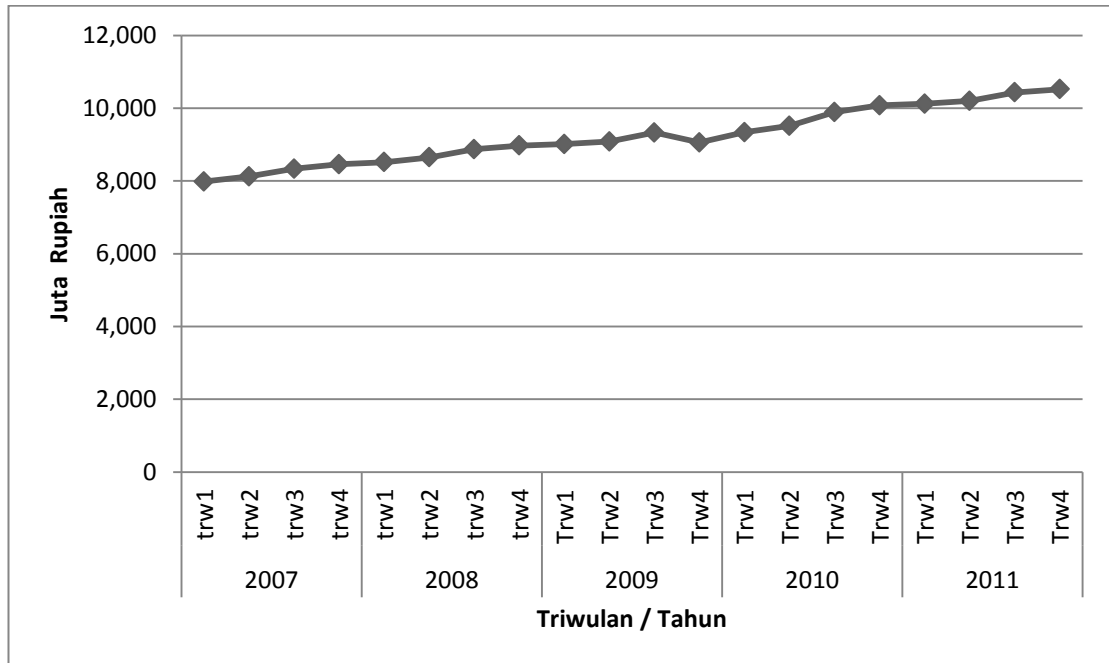
Perekonomian suatu daerah merupakan gambaran tentang komposisi perekonomian daerah dimana dalam hal ini komposisi perekonomian daerah terdiri atas sembilan sektor ekonomi/lapangan usaha. Sehingga struktur ekonomi sekaligus dapat menunjukkan tinggi rendahnya kontribusi atau peran seluruh sektor ekonomi terhadap pembentukan PDRB pada daerah tertentu. Untuk melihat lebih jauh tentang perkembangan kinerja perekonomian Sumatera Barat, salah satunya dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Tabel 4.3
Perkembang PDRB Atas Harga Konstan 2000 di Sumatera Barat Triwulan
Tahun 2007-2011

TAHUN	TRIWULAN	JUTA RUPIAH	PERTUMBUHAN (%)
2007	I	7.982.000	-
	II	8.123.000	1,76
	III	8.336.000	2,62
	IV	8.456.000	1,43
2008	I	8.517.000	0,72
	II	8.647.000	1,52
	III	8.871.000	2,60
	IV	8.973.000	1,14
2009	I	9.014.000	0,45
	II	9.083.000	0,76
	III	9.330.000	2,71
	IV	9.054.000	-2,95
2010	I	9.366.000	3,33
	II	9.514.000	1,90
	III	9.892.000	3,93
	IV	10.076.000	1,86
2011	I	10.120.000	0,43
	II	10.201.000	0,80
	III	10.433.000	2,27
	IV	10.520.000	0,84

Sumber: BPS Sumatera Barat, Tahun 2007-2011

Grafik 4.2
Perkembangan PDRB di Sumatera Barat Triwulan I Tahun 2007-Triwulan IV Tahun 2011



Sumber: BPS Sumatera Barat, Tahun 2007-2011

Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa nilai tambah PDRB atas harga konstan menunjukkan peningkatan sepanjang triwulan I tahun 2007 sampai triwulan IV tahun 2011. Laju pertumbuhan PDRB atas harga konstan yang paling tinggi terjadi pada triwulan IV tahun 2010 yaitu sebesar 3,93%. Melejitnya pertumbuhan ekonomi Sumbar ini merupakan pemulihan perekonomian Sumbar 5 tahun (2006-2010) akibat gempa bumi 30 September 2009. Peningkatan ini disebabkan perkembangan oleh masing-masing sektor dan sub sektor pada PDRB harga konstan, peningkatan sektor yang paling tinggi pada triwulan IV tahun 2010 yaitu sektor jasa-jasa. Sedangkan laju pertumbuhan yang paling rendah terjadi pada triwulan IV tahun 2009 yaitu minus 2,95 sebagai akibat

gempa besar yang terjadi di penghujung triwulan III-2009 mengakibatkan dampak yang serius terhadap ekonomi di Sumbar. Secara keseluruhan tahun 2009 ekonomi Sumbar diperkirakan hanya tumbuh sebesar 3,92%. PDRB atas dasar harga konstan memperlihatkan peningkatan pendapatan dari Rp 7.584 triliun rupiah (I-2006) menjadi Rp 10.520 triliun rupiah (IV-2011).

4.4 Perkembangan Inflasi

Inflasi merupakan indikator makro yang penting dalam system perekonomian, inflasi yang terjadi dikarenakan adanya tingginya permintaan masyarakat terhadap suatu barang dan kenaikan yang timbul karena kenaikan biaya produksi. Selama tahun 2007 triwulan I hingga tahun 2011 triwulan IV inflasi di Sumatera Barat mengalami perkembangan naik turun yang dapat terlihat pada tabel 4.4 dan grafik 4.3 di bawah ini.

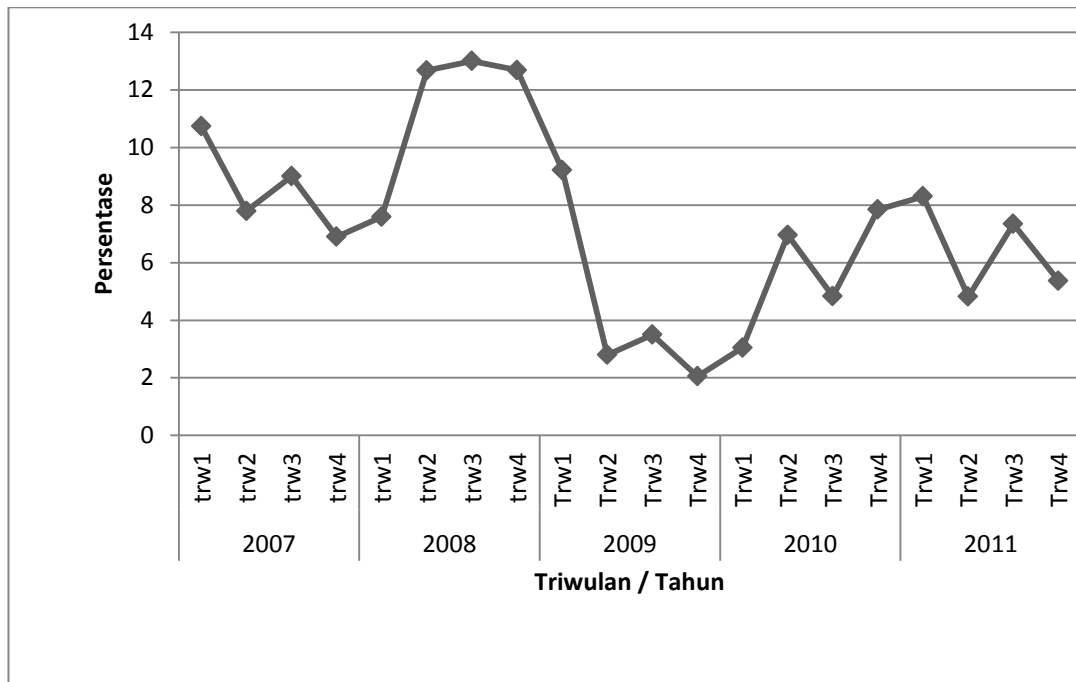
Table 4.4
Perkembang Laju Inflasi di Sumatera Barat Triwulan Tahun 2007-2011

TAHUN	TRIWULAN	INFLASI (%)	PERTUMBUHAN (%)
2007	I	10.73	-
	II	7.79	-27.40
	III	9.00	15.53
	IV	6.90	-23.33
2008	I	7.59	10
	II	12.67	66.91
	III	13.00	2.60
	IV	12.68	-2.46
2009	I	9.21	-27.36
	II	2.80	-69.60
	III	3.50	25
	IV	2.05	-41.42
2010	I	3.05	48.78
	II	6.96	128.19
	III	4.83	-30.60
	IV	7.84	62.31
2011	I	8.30	5.86
	II	4.82	-41.92
	III	7.34	52.28
	IV	5.37	-26.83

Sumber: Bank Indonesia, Tahun 2007-2011

Grafik 4.3

Perkembangan Laju Inflasi di Sumatera Barat Triwulan I Tahun 2007 – Triwulan IV Tahun 2011



Sumber: Bank Indonesia, Tahun 2007-2011

Perkembangan laju inflasi di Sumatera Barat menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif. Tingkat inflasi tertinggi terjadi pada triwulan III tahun 2008 sebesar 13% disebabkan adanya permasalahan distribusi yang menyebabkan kelangkaan suatu barang dan adanya hari raya keagamaan, selain itu juga dipengaruhi oleh faktor cuaca yang relatif kurang mendukung, terutama pada produksi tanaman pangan dan aktifitas nelayan laut. Tingkat inflasi terendah pada tahun 2009 triwulan IV pasca gempa 30 September 2009 laju inflasi kota Padang tercatat sebesar 2,05%. Laju inflasi ini merupakan yang terendah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir setelah sebelumnya di triwulan II-2009, laju inflasi kota Padang juga sempat menyentuh pada level 2,80%. Hal ini disebabkan laju inflasi kota Padang didukung oleh kesinambungan arus distribusi barang, dimana pasokan barang kebutuhan sehari-hari baik yang berupa bantuan maupun barang

perdagangan telah berhasil membuat pasokan barang yang ada relatif terjaga. Selain itu masih terbatasnya pengeluaran konsumsi masyarakat juga membuat ekspektasi masyarakat terhadap harga kebutuhan pokok terutama bahan pangan relatif menurun.

4.5 Perkembangan Bagi Hasil Pembiayaan Bank Syariah

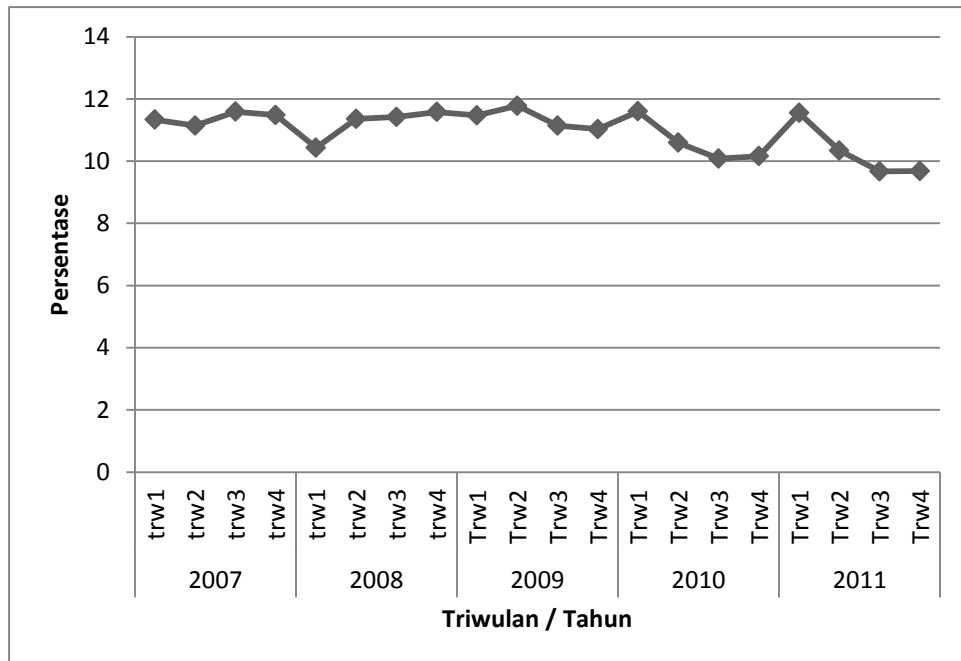
Prinsip bagi hasil merupakan prinsip yang berdasarkan syariah Islam yang digunakan oleh bank syariah dalam menetapkan imbalan yang akan diperoleh pelanggan sehubungan dengan penggunaan dana pelanggan yang dipercayakan kepadanya. Perkembangan tingkat bagi hasil yang diberikan bank syariah kepada nasabah dapat dilihat pada tabel 4.5 dan grafik 4.4 dibawah ini.

Tabel 4.5
Perkembangan Tingkat Bagi Hasil Pembiayaan Bank Syariah di Sumatera Barat Tahun Triwulan 2007. I -2011. IV

TAHUN	TRIWULAN	PERSENTASE (%)
2007	I	11,33
	II	11,14
	III	11,59
	IV	11,48
2008	I	10,43
	II	11,36
	III	11,42
	IV	11,58
2009	I	11,47
	II	11,78
	III	11,14
	IV	11,03
2010	I	11,80
	II	10,59
	III	10,08
	IV	10,16
2011	I	11,55
	II	10,34
	III	9,67
	IV	9,68

Sumber: Bank Indonesia, 2011

Grafik 4.4
Perkembangan Tingkat Bagi Hasil Pembiayaan Bank Syariah di Sumatera Barat Tahun Triwulan 2007. I - 2011. IV



Sumber: Bank Indonesia, 2011

Bagi hasil pembiayaan merupakan tingkat bagi hasil pembiayaan rata-rata yang ditetapkan perbankan syariah. Dari data diatas dapat diketahui bahwa perkembangan bagi hasil perbankan syariah mengalami fluktuatif yang tidak begitu tinggi hanya sekitar 1%. Hal ini disebabkan perbankan syariah ingin meningkatkan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Pada triwulan I tahun 2010 terjadi peningkatan bagi hasil yang cukup tinggi pembiayaan yaitu dari 11,03% IV-2009 menjadi 11,80%. Peningkatan bagi hasil pembiayaan tersebut membuat daya permintaan masyarakat terhadap pembiayaan konsumtif menurun. Sedangkan pada tingkat bagi hasil paling rendah yaitu pada tahun 2011 triwulan IV mencapai sebesar 9,68%.

4.6 Perkembangan Suku Bunga Pinjaman Bank

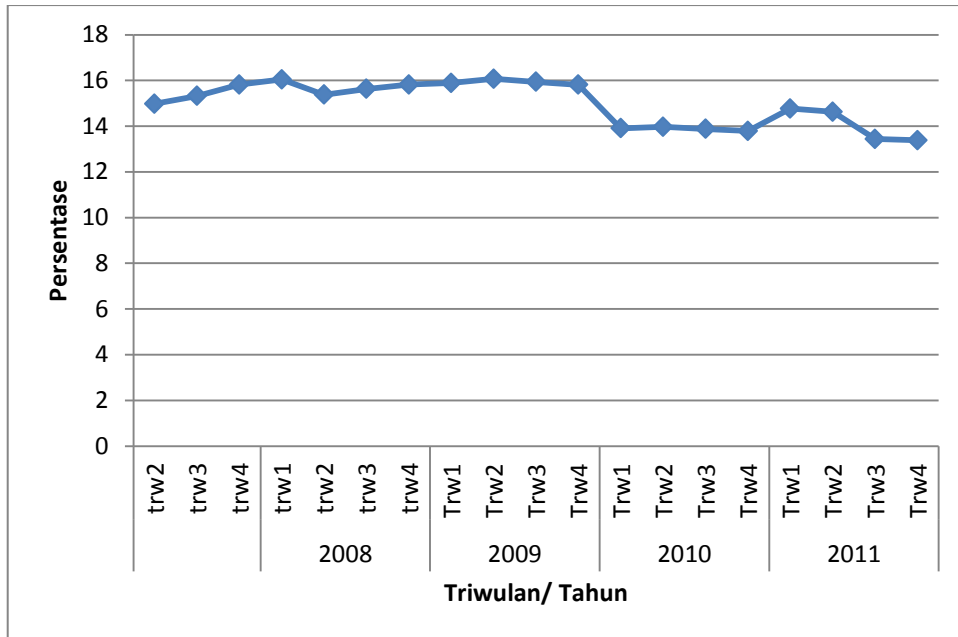
Tingkat suku bunga merupakan pertimbangan utama bagi nasabah dalam melakukan permintaan kredit kepada bank konvensional, selain itu suku bunga juga berpengaruh positif terhadap permintaan pembiayaan pada bank syariah. Pada tabel 4. 6 dan grafik 4.5 dibawah ini dapat dilihat bagaimana perkembangan tingkat suku bunga.

Tabel 4.6
Perkembangan Tingkat Suku Bunga Pinjaman Bank konvensional di Sumatera Barat Tahun Triwulan 2007. I-2011. IV

TAHUN	TRIWULAN	PERSENTASE (%)
2007	I	15,35
	II	14,98
	III	15,32
	IV	15,82
2008	I	16,04
	II	15,38
	III	15,63
	IV	15,82
2009	I	15,52
	II	16,07
	III	15,94
	IV	15,81
2010	I	13,91
	II	13,97
	III	13,88
	IV	13,79
2011	I	14,77
	II	14,63
	III	13,44
	IV	13,38

Sumber: Bank Indonesia, 2011

Grafik 4.5
Perkembangan Tingkat Suku Bunga Pinjaman Bank Konvensional di Sumatera Barat Tahun Triwulan 2007. I-2011. IV



Sumber: Bank Indonesia, 2011

Suku bunga merupakan harga yang harus dibayar karena meminjamkan uang untuk suatu jangka waktu tertentu. Dari data diatas dapat diketahui bahwa perkembangan suku bunga pada bank konvensional mengalami fluktuatif yang tidak begitu tinggi hanya sekitar 1 hingga 2 persen. Hal ini disebabkan bank konvensional ingin meningkatkan penyaluran kredit kepada masyarakat. Pada triwulan II tahun 2009 terjadi peningkatan suku bunga kredit yang cukup tinggi yaitu dari 15,52% I-2009 menjadi 16,07%. Peningkatan suku bunga kredit tersebut membuat daya permintaan masyarakat terhadap kredit konsumtif menurun dan nasabah lebih banyak melakukan kegiatan investasi. Sedangkan pada tingkat suku bunga paling rendah yaitu pada tahun 2011 triwulan IV mencapai sebesar 13,38%.

BAB V

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan hasil pengolahan data dan pembahasan hasil pengolahan data. Untuk analisa data, penulis menggunakan metode ekonometrik, yaitu regresi linear berganda dengan metode Enter. Metode Enter adalah memasukan semua prediktor ke dalam analisis sekaligus.

5.1 Analisa Data

5.1.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan agar output yang dihasilkan menjadi valid dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Beberapa uji asumsi klasik yang perlu dilakukan sebelum pengolahan data dengan menggunakan metode regresi berganda adalah uji, normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan uji heterokedastisitas.

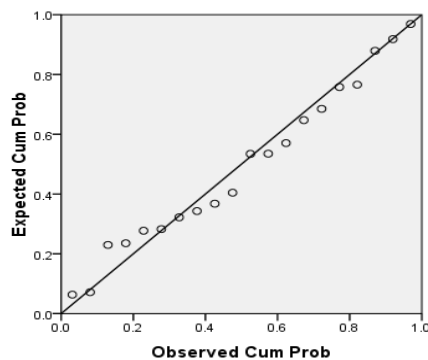
5.1.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah variabel dalam penelitian ini telah terdistribusi secara normal. Uji normalitas data pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 5.1.

Gambar 5.1
Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Permintaan Pembiayaan Konsumtif



Pada gambar 5.1, dapat terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi gangguan normalitas, yang berarti data terdistribusi normal.

5.1.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variable independen yang memiliki kemiripan dengan variable independen lain dalam satu model, yang dapat dilihat dari nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas.

Tabel 5.1
Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1(Constant)		
Produk Domestik Regional Bruto	.477	2.095
Inflasi	.836	1.196
Bagi Hasil	.474	2.112
Suku Bunga	.427	2.342

a. Dependent Variable: Permintaan Pembiayaan Konsumtif

Uji multikolonieritas dengan uji nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF), hasilnya tampak seperti dalam tabel 5.1. Pada Tabel 5.1 dapat dilihat bahwa nilai angka tolerance dan nilai VIF adalah 0,477 dan 2,095 untuk variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selanjutnya, untuk variable Inflasi nilainya adalah 0,836 dan 1,195, sedangkan nilai untuk variabel Bagi Hasil adalah 0,474 dan 2,112, dan nilai tolerance dan VIF untuk variable suku bunga adalah 0,427 dan 2,342. Nilai angka VIF dari keempat variabel dependen berada

dibawah angka 10 dan nilai tolerancinya tidak kurang dari 0,1. Hal ini membuktikan tidak ada terjadinya multikolinearitas pada penelitian ini.

5.1.1.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu. Untuk mendeteksi terjadinya kasus autokorelasi, dapat dilakukan dengan melihat pada tabel DW (Durbin Watson). Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.2.

Tabel 5.2
Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.990 ^a	.980	.974	.04665	2.075

a. Predictors: (Constant), Suku Bunga, Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto, Bagi Hasil

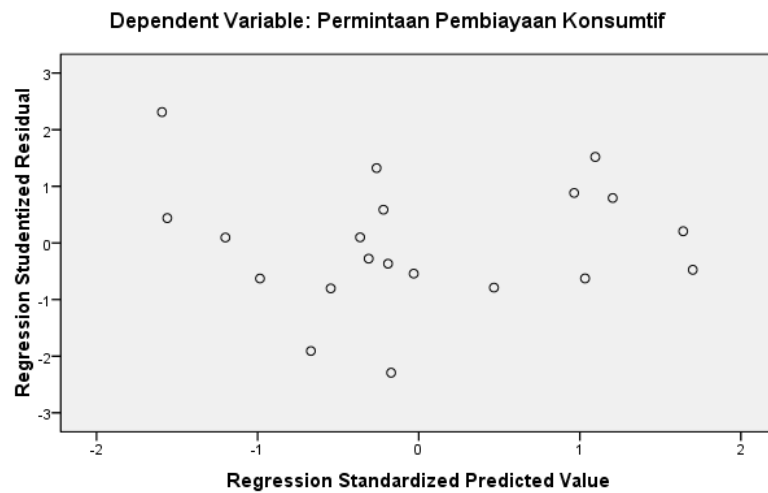
b. Dependent Variable: Permintaan Pembiayaan Konsumtif

Pada Tabel diatas diperoleh nilai Durbin-Watson adalah sebesar 2,075 dan nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikansi 5% , jumlah data 20 dan variable independen 4 ($k=4$). Sedangkan nilai du yang diperoleh dari tabel Durbin-Watson adalah $du=1,828$. Nilai Durbin-Watson sebesar 2,075, suatu model regresi dinyatakan tidak terkena kasus autokorelasi apabila $du < DW < 4-du$. Maka, dari hasil regresi dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi kasus autokorelasi, karena nilai DW yang didapatkan lebih besar dari nilai du dan lebih kecil dari $4-du$ ($1,828 < 2,075 < 4-1,828 = 2,172$).

5.1.1.4 Uji Heterokedastisitas

Pengujian ada atau tidak adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji grafik. Uji grafik untuk pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik scatter plot dan hasilnya tampak seperti dalam gambar 5.2.

Gambar 5.2
Uji Heterokedastisitas
Scatterplot



Pada Gambar diatas dapat dilihat bahwa sebaran data dalam *scatter plot* tidak membentuk suatu pola tertentu. Hal ini berarti bahwa tidak terjadi kasus heterokedastisitas dalam penelitian ini.

Memperhatikan hasil dari uji asumsi klasik diatas, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini terbebas dari kasus asumsi klasik. Hal ini dikarenakan pada hasil penelitian ini, data sudah terdistribusi secara normal.

5.2 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis yang dilakukan dengan metode enter, guna memperoleh model dengan komposisi variable yang signifikan terhadap permintaan pembiayaan konsumtif pada bank syariah.

5.2.1 Uji Simultan (F-test)

Uji pengaruh simultan bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, uji ini menggunakan nilai F-test. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software SPSS diperoleh hasil nilai F-test seperti tampak dalam Tabel 5.3.

Tabel 5.3
Hasil Perhitungan Nilai F-test

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.566	4	.391	179.919	.000 ^a
	Residual	.033	15	.002		
	Total	1.598	19			

a. Predictors: (Constant), Suku Bunga, Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto, Bagi Hasil

b. Dependent Variable: Permintaan Pembiayaan Konsumtif

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5.3 memperlihatkan bahwa nilai F- test adalah sebesar 179,919 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Nilai F – test sebesar 179,919 jauh lebih besar dari nilai F-tabel = 3,056 yang berarti bahwa variabel independen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi dan Profit Sharing (Bagi Hasil), dan Suku Bunga secara simultan mempengaruhi variabel dependen yaitu Permintaan Pembiayaan Konsumtif pada Bank Syariah di Sumatera Barat.

5.2.2 Uji Parsial (t-test)

Masing-masing variabel independen secara individual (parsial) mempengaruhi variabel dependen jika $t\text{-test} > t\text{-tabel}$, dan begitu sebaliknya masing-masing variabel independen secara individual (parsial) tidak mempengaruhi variabel dependen jika $t\text{-test} < t\text{-tabel}$ dengan tingkat kepercayaan 95%. Dalam penelitian ini dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05 dengan jumlah data 20 dan variabel independen 4, maka didapatkan nilai t_{tabel} sebesar 2,086.

Tabel 5.4
Hasil Perhitungan Nilai t – test

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-41.829	3.048		-13.725	.000
Produk Domestik Regional Bruto	6.942	.412	.900	16.860	.000
Inflasi	.008	.004	.094	2.324	.035
Bagi Hasil	-.081	.023	-.190	-3.540	.003
Suku Bunga	.001	.017	.004	.077	.939

a. Dependent Variable: Permintaan Pembiayaan Konsumtif

1. Variabel PDRB mempunyai nilai positif dengan nilai $t\text{-hitung} = (16,860)$ lebih besar dari $t\text{-tabel} 2,086$, dengan nilai signifikannya 0,000 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05. Dan ini menunjukkan bahwa perubahan nilai PDRB memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap Permintaan Pembiayaan Konsumtif pada Bank Syariah di Sumatera Barat.

2. Variabel inflasi mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap permintaan pembiayaan konsumtif pada Bank Syariah di Sumatera Barat yang terlihat dari nilai t-hitung = (2,324) lebih besar dari t-tabel 2,086, dengan nilai signifikannya 0,035 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05.
3. Variabel tingkat bagi hasil mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap permintaan konsumtif pada Bank Syariah di Sumatera Barat yang terlihat dari nilai t-hitung sebesar (-3,540) lebih kecil dari t-tabel 2,086 dengan nilai signifikannya 0,003 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05.
4. Variabel suku bunga mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap permintaan pembiayaan konsumtif di Sumatera Barat yang terlihat dari nilai t-hitung = (0,077) lebih kecil dari t-tabel 2,086 dengan nilai signifikannya 0,939 lebih besar dari nilai probabilitas 0,05.

5.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji seberapa besar kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabilitas variabel dependen dalam model regresi. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software SPSS diperoleh hasil nilai koefisien determinasi seperti dalam Tabel 5.5.

Tabel 5.5
Hasil Perhitungan Nilai Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.990 ^a	.980	.974	.04665

a. Predictors: (Constant), Suku Bunga, Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto, Bagi Hasil

b. Dependent Variable: Permintaan Pembiayaan Konsumtif

Berdasarkan hasil perhitungan dalam Tabel 5.5 didapatkan nilai koefisien adjusted R^2 sebesar 0.974, yang berarti bahwa variabilitas dari variabel dependen

dapat dijelaskan oleh variabilitas dari variabel independen sebesar 97,4 %. Sedangkan sisanya sebesar 2,6 % dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak masuk dalam model regresi.

5.4 Persamaan Regresi

Berdasarkan uji parsial di atas pada table 5.4, persamaan atau model regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = -41,829 + 6,942X_1 + 0,008X_2 - 0,081X_3 + 0,001X_4$$

(16.860) (2.324) (-3.540) (0.077)

Dari model regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar -41,829, menyatakan bahwa jika variabel independen bernilai nol atau tidak ada pengaruh dari variabel independen, maka besarnya Y (permintaan pembiayaan konsumtif) akan turun sebesar Rp. 41,829 juta.
2. Nilai koefisien regresi X_1 (PDRB) diperoleh sebesar 6,942 yang mempunyai hubungan yang positif signifikan, artinya setiap PDRB di Sumatera Barat meningkat Rp. 1 juta, maka permintaan pembiayaan konsumtif akan mengalami kenaikan sebesar Rp. 6,942 juta.
3. Nilai koefisien regresi X_2 (Inflasi) diperoleh sebesar 0,008, mempunyai hubungan yang positif signifikan artinya setiap inflasi akan meningkatkan rata-rata permintaan pembiayaan konsumtif sebesar Rp. 0,08 juta.
4. Nilai koefisien regresi X_3 (Bagi Hasil) diperoleh sebesar -0,081, mempunyai hubungan yang negative signifikan artinya setiap tingkat

bagi hasil akan menurunkan rata-rata permintaan pembiayaan konsumtif sebesar Rp. 0,81 juta.

5. Nilai koefisien regresi X_4 (Suku Bunga) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permintaan pembiayaan konsumtif pada Bank Syariah di Sumatera Barat dengan nilai koefisien regresi (0,077), karena tingkat suku bunga tidak menjadi acuan bagi seorang nasabah bank syariah dalam melakukan permintaan pembiayaan konsumtif, akan tetapi nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa tingkat suku bunga pada bank konvensional juga memiliki kecenderungan dalam mempengaruhi permintaan pembiayaan konsumtif pada bank syariah.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pembiayaan konsumtif pada bank syariah dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa permintaan pembiayaan konsumtif pada bank syariah di Sumatera Barat sebagai variabel terikat dipengaruhi secara signifikan positif oleh variabel bebas PDRB, Inflasi, dan signifikan negatif oleh variabel Bagi Hasil. Sedangkan variabel Suku Bunga tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel permintaan pembiayaan konsumtif pada bank syariah di Sumatera Barat.
2. Berpengaruh positifnya variabel PDRB terhadap permintaan pembiayaan konsumtif pada bank syariah dikarenakan penyaluran pembiayaan perbankan terhadap perubahan PDRB menunjukkan bahwa posisi penyaluran pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah tergantung pada kegiatan ekonomi di Sumatera Barat. Untuk variabel inflasi juga menunjukkan hubungan yang positif, karena pada saat terjadi inflasi masyarakat akan memenuhi kebutuhan konsumsinya dengan melakukan permintaan pembiayaan konsumtif semakin tinggi inflasi maka permintaan akan pembiayaan juga meningkat.
3. Variabel bagi hasil menunjukkan hubungan yang signifikan negatif terhadap permintaan pembiayaan konsumtif, dikarenakan bagi hasil merupakan biaya penggunaan dana oleh nasabah peminjam yang harus

dikembalikan, semakin tinggi tingkat bagi hasil yang di tetapkan maka akan menurunkan permintaan pembiayaan konsumtif begitu juga sebaliknya.

4. Hasil yang tidak signifikan ditunjukkan oleh variabel tingkat suku buga pada bank konvensional terhadap permintaan pembiayaan konsumtif, karena dengan meningkatnya atau turun tingkat suku bunga pada bank konvensional tidak mempengaruhi nasabah untuk melakukan permintaan pembiayaan konsumtif pada bank syariah.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis dapat menyimpulkan saran yang perlu mendapat perhatian :

1. Permintaan pembiayaan konsumtif pada bank syariah di Sumatera Barat terus mengalami peningkatan, oleh karena itu hendaknya bank syariah dapat mengoptimalkan porsi bagi hasil yang dapat memberikan keuntungan bagi nasabah, sehingga akan mendorong peningkatan permintaan pembiayaan konsumtif dimasa yang akan datang.
2. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai peran yang cukup besar dalam peningkatan permintaan pembiayaan konsumtif, maka dari itu diperlukan peran pemerintah dalam menjaga kegiatan ekonomi di Sumatera Barat.
3. Dalam penelitian menggunakan data time series yang masih terbatas, oleh karena itu diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan data time

series dengan periode lebih panjang agar dapat menggambarkan kondisi sebenarnya.

4. Untuk penelitian berikutnya diharapkan menambah variabel makroekonomi selain pertumbuhan ekonomi dan inflasi, agar dapat mengetahui pengaruh variabel makroekonomi apa saja terhadap permintaan pembiayaan pada bank syariah.
5. Diharapkan perbankan syariah di Sumatera Barat dapat bersaing antar bank dalam memberikan pembiayaan konsumtif dengan meningkatkan asset dan pelayanan sehingga dapat menambah pendapatan.